



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/515/2014

TENTANG

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan dan disparitas antar provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa pemberlakuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dilakukan sebagai dasar perencanaan program kesehatan dan advokasi dalam menentukan prioritas pembangunan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  5. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/IV/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : IPKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan Potensi Desa (Podes) tahun 2013 yang dirancang untuk menghasilkan data dasar dan indikator kesehatan yang bermanfaat untuk perbaikan sistem informasi kesehatan berbasis data.
- KETIGA : IPKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan untuk penentuan prioritas pembangunan kesehatan masyarakat baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam peningkatan pembangunan kesehatan, perencanaan program dan penentuan alokasi bantuan dari pusat ke daerah.
- KEEMPAT : IPKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan bagi para pengambil keputusan di jajaran kesehatan, pengelola program, petugas kesehatan, dan pejabat lainnya baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam melaksanakan upaya peningkatan pembangunan kesehatan.
- KELIMA : Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dengan melibatkan organisasi profesi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/515/2014  
TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN  
KESEHATAN MASYARAKAT

## **INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Arah pembangunan kesehatan jangka panjang dicantumkan secara ringkas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pembangunan bidang kesehatan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Kebijakan pembangunan kesehatan, terutama diarahkan pada: (1) peningkatan jumlah jaringan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; (3) pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4) peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; (5) peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; (6) pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan sebaran tenaga kesehatan.

Masyarakat dan unsur lainnya harus diajak serta dalam bentuk pemberdayaan dan kemitraan mengelola kehidupan lingkungan yang layak sehingga konsep sehat secara paripurna dapat tercapai. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih menempatkan masyarakat sebagai obyek, bukan sebagai subyek pembangunan kesehatan. Bila masyarakat berperan aktif, seharusnya berbagai masalah kesehatan yang timbul dewasa ini tidak perlu terjadi (Depkes, 2005). Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk rentan yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut, dan keluarga miskin yang dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Kesehatan, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Derajat kesehatan merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komposit dari tiga pilar utama ini selanjutnya dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

*Human Development Index* (HDI) atau IPM adalah salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam paradigma IPM, fokus utama ditujukan untuk pengembangan manusia, kemakmuran, keadilan, dan keberlanjutan (UNDP, 2011). Dasar pemikiran paradigma ini mengacu kepada keseimbangan ekologi manusia dan tujuan utamanya adalah aktualisasi optimal potensi manusia.

Indikator kesehatan dalam IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dari sejak dilahirkan, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Namun muncul pertanyaan, apakah hanya cukup umur harapan hidup yang panjang dapat mendukung pembangunan manusia. Diharapkan pembangunan manusia dari sektor kesehatan, selain mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang tetapi juga sehat berkualitas dan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, belum ada arah intervensi yang jelas khususnya di bidang kesehatan untuk meningkatkan UHH, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih rinci dari indikator kesehatan yang terkait dengan UHH. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya.

IPKM pertama (tahun 2007) yang dikembangkan oleh Balitbangkes didasarkan pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007 dan Survei Potensi Desa (Podes) 2008. IPKM jilid pertama telah menjadi dasar pengambil kebijakan di pusat maupun di tingkat pemerintahan kabupaten/kota (Kemenkes, 2010). IPKM 2007 juga



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM (No. C00201102682, tanggal 8 Juli 2011).

Dalam buku ini disajikan 2 hasil perhitungan IPKM. Hasil pertama menggunakan model IPKM 2007 yang dapat berguna untuk membandingkan pencapaian dengan tahun 2007. Hasil kedua merupakan pengembangan dari model IPKM tahun 2007 yang selanjutnya disebut IPKM 2013. IPKM 2007 yang terdiri dari 24 indikator terpilih dikembangkan menjadi 30 indikator pada IPKM 2013 dengan tujuan memperkaya informasi indikator yang mendukung dasar pengambil kebijakan pembangunan bidang kesehatan.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari pengembangan model IPKM adalah untuk memperkaya informasi indikator kesehatan yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat.

IPKM dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Penentuan peringkat provinsi dan kabupaten/kota dalam keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat.
2. Dasar perencanaan program pembangunan kesehatan di kabupaten/kota.
3. Bahan advokasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar terpacu menaikkan peringkatnya dengan melakukan prioritas program kesehatan beserta sumber dayanya.
4. Salah satu kriteria dan pertimbangan penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) dan dari provinsi ke kabupaten/kota.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

## **BAB II**

### **METODE IPKM 2013**

#### **2.1 Kerangka Konsep**

IPKM dikembangkan berdasarkan beberapa aspek seperti indikator pembangunan kesehatan yang selama ini sudah digunakan, faktor determinan kesehatan dan prioritas program kesehatan. Indikator pembangunan kesehatan yang selama ini sudah digunakan di Indonesia mengacu pada prioritas pembangunan kesehatan dan informasi besaran masalah dari survey nasional. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah kesehatan balita, kematian ibu, kematian bayi, penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, perilaku berisiko serta status gizi kelompok rentan. Indikator utama pembangunan kesehatan tersebut mempunyai beberapa faktor determinan yang berkaitan satu sama lain dan dapat bersifat determinan bersama dari indikator kunci kesehatan. Secara umum, faktor determinan kesehatan mencakup aspek perilaku dan lingkungan yang mendukung. Secara lebih spesifik faktor perilaku dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, budaya dan demografi. Sementara lingkungan yang kondusif lebih berkaitan dengan aspek input seperti program kesehatan yang mencakup kebijakan, program dan strategi intervensi, serta sumber daya yang mendukung. Prioritas program kesehatan pada dasarnya mengarah pada penyelesaian besaran masalah di populasi, tingkat keparahan dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas serta ketersediaan upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Beberapa model pendekatan kesehatan masyarakat telah dikembangkan oleh organisasi ataupun institusi di tingkat global. Salah satu model yang cukup komprehensif dalam pendekatan kesehatan masyarakat adalah model determinan sosial kesehatan yang mencakup berbagai tingkatan ekologi seperti kesehatan usia dini, peran keluarga, masyarakat serta sistem pelayanan.

Dalam model yang ditampilkan pada Gambar 2.1, tampak bahwa secara umum pada level usia dini, keluarga, masyarakat dan sistem pelayanan, kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan yang saling terkait seperti biofisikal, psikososial, individual, masyarakat, usia dini, keluarga, dan determinan sistem pelayanan (Newberry dan Taylor, 2005). Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain, sehingga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat berarti



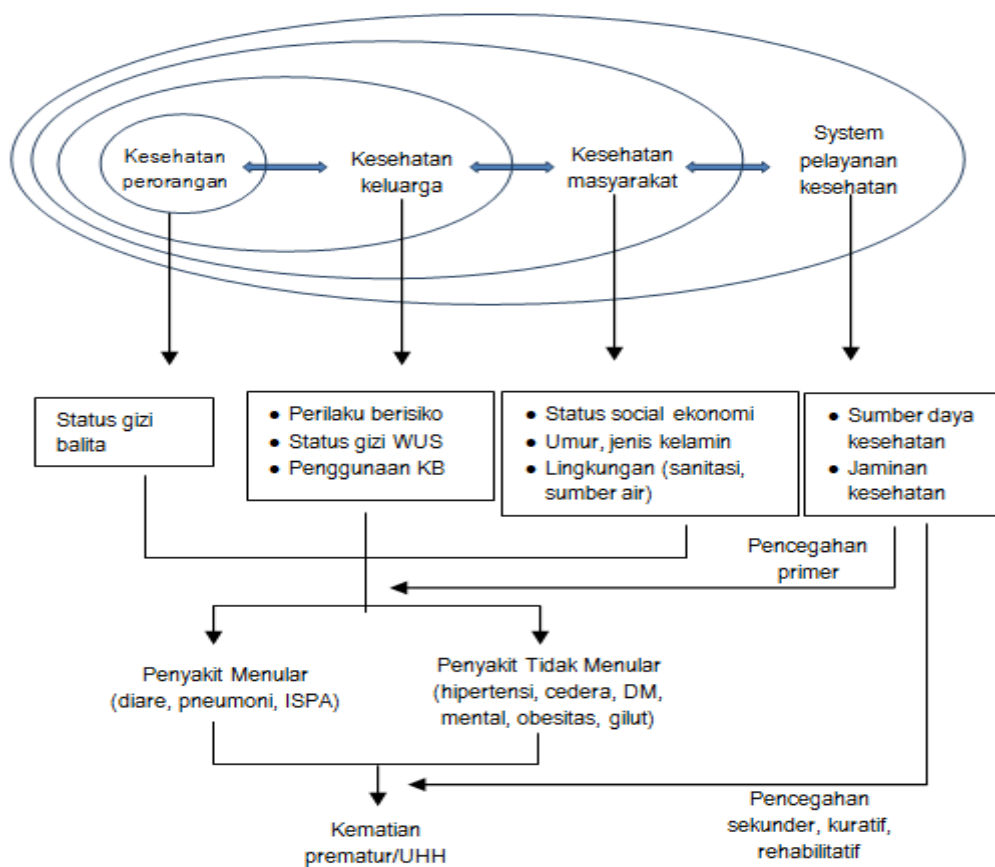


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

mempertimbangkan juga determinan yang mempengaruhi baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, biologis dan psikososial.

Berdasarkan model determinan sosial kesehatan, dikembangkan lebih lanjut menjadi kerangka konsep pengembangan IPKM. Indikator utama pembangunan kesehatan yang digunakan mencakup kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku, penyakit tidak menular, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Indikator tersebut dikaitkan dengan beberapa faktor determinan kesehatan seperti determinan sosial, ekonomi dan demografi.



**Gambar 2.1** Modifikasi Model Determinan Sosial Kesehatan (Newberry dan Taylor, 2005)

## 2.2 Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun IPKM 2013 adalah Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan Potensi Desa (Podes) 2011.

### Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013

Riskesdas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data dasar bidang kesehatan dan dapat menghasilkan indikator kesehatan, sehingga bermanfaat untuk perbaikan sistem informasi kesehatan berbasis data. Data Riskesdas 2013 cukup kaya dengan informasi status kesehatan





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

dan faktor penentu kesehatan, baik pada tingkat rumah tangga maupun individu. Data Riskesdas dikumpulkan dengan tiga cara yaitu wawancara menggunakan kuesioner, pengukuran fisik, dan pemeriksaan biokimia. Ruang lingkup data yang dikumpulkan sebagai berikut:

1. Status gizi balita dan dewasa
2. Penyakit menular dan penyakit tidak menular
3. Disabilitas dan cedera
4. Kesehatan mental
5. Kesehatan lingkungan
6. Pengetahuan, sikap, dan perilaku
7. Akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan
8. Farmasi dan pelayanan kesehatan tradisional
9. Kesehatan ibu dan KB
10. Kesehatan anak, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan
11. Pengukuran lingkar perut dan lingkar lengan atas
12. Pengukuran tekanan darah
13. Pemeriksaan visus
14. Pemeriksaan telinga
15. Pemeriksaan gigi
16. Pemeriksaan darah dan urin
17. Pemeriksaan garam dan air

Riskesdas 2013 merupakan survei dengan disain potong lintang yang menggunakan seluruh rumah tangga di 33 provinsi di Indonesia sebagai populasi penelitian. Sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga diambil dari 497 kabupaten/ kota di 33 provinsi dengan jumlah sampel dirancang dapat menghasilkan indikator yang memberikan gambaran nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Jumlah sampel yang berhasil dikumpulkan sebanyak 294.959 rumah tangga dan 1.027.763 orang. Selama proses pengumpulan data dilakukan validasi oleh tim independen dari universitas yaitu UI, UNHAS, dan UNAIR.

Keterbatasan Riskesdas antara lain Blok Sensus tidak terjangkau, pembentukan kabupaten baru sehingga mengakibatkan sampel rumah tangga tidak ditemui, dan tidak semua indikator dapat memberi gambaran di tingkat kabupaten, sebagai contoh data biomedis hanya menggambarkan tingkat nasional.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

### **Potensi Desa (Podes) Tahun 2011**

Badan Pusat Statistik melakukan pengumpulan data Potensi Desa (Podes). Podes bertujuan menyediakan data tentang potensi dan kinerja pembangunan di desa/ kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada di desa/ kelurahan. Data yang dikumpulkan termasuk data terkait bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan

Pendataannya menggunakan cara sensus untuk seluruh desa/ kelurahan atau wilayah administrasi setingkat lainnya yang ada di Indonesia. Pengumpulan data melalui wawancara langsung oleh petugas pencacah dengan kepala desa/ lurah atau staf yang ditunjuk atau narasumber lain yang relevan. Variabel yang dapat digunakan untuk kepentingan kajian pembangunan kesehatan di tingkat desa, diantaranya adalah fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa, posyandu, dll) dan sumber daya manusia bidang kesehatan (dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya). Pada IPKM 2013 ini menggunakan data Potensi Desa yang mencakup jumlah dokter, jumlah posyandu, jumlah bidan, jumlah penduduk, jumlah kecamatan, dan jumlah desa.

### **2.3 Penentuan Indikator**

Penentuan indikator dalam IPKM 2013 berdasarkan kerangka konsep determinan sosial kesehatan (Gambar 2.1) yang meliputi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam penentuan indikator adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas program kesehatan nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.
- b. Komitmen untuk pembangunan kesehatan secara global atau seiring dengan target *Millennium Development Goals* (MDGs) dan *Post MDGs*.
- c. Besaran masalah kesehatan yang menjadi masalah kesehatan utama secara nasional.
- d. Pertimbangan secara referensi dan rekomendasi pelaksana program kesehatan.
- e. Pertimbangan secara statistik mencakup aspek variasi data dan jumlah sampel untuk keterwakilan kabupaten/ kota.

Proses penentuan indikator ini dilakukan melalui beberapa pertemuan konsultasi dan diskusi dengan para pakar baik secara nasional maupun internasional dan para pengambil keputusan pada program kesehatan terkait.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

### **BAB III** **PERUMUSAN IPKM**

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) pertama kali disusun pada tahun 2010 dengan menggunakan data survei tahun 2007 dan 2008, untuk selanjutnya indeks tersebut pada pembahasan ini disebut IPKM 2007. Model IPKM 2007 dibahas kembali pada bab ini dan diaplikasikan dengan menggunakan data Riskesdas 2013 dan Podes 2011.

#### **3.1 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2007**

Model IPKM 2007 menggunakan indikator yang ada pada data Riskesdas 2007, Susenas 2007 dan Podes 2008. Model IPKM 2007 terdiri dari 24 indikator. Pemilihan indikator yang memenuhi syarat RSE <30 dan dimiliki minimal oleh 75% kabupaten/ kota. Pengkategorian bobot indikator terdiri 3 tingkatan, yaitu bernilai perlu (bobot 3), penting (bobot 4), dan mutlak (bobot 5). Pemilihan indikator dan penentuan bobot berdasarkan kesepakatan pakar bidang kesehatan. Indikator dan bobot yang digunakan IPKM 2007 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1 Indikator dan Bobot IPKM 2007

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot</b>	<b>Kategori Bobot</b>
1	Balita gizi buruk dan kurang	5	Mutlak
2	Balita sangat pendek dan pendek	5	Mutlak
3	Balita sangat kurus dan kurus	5	Mutlak
4	Akses air bersih	5	Mutlak
5	Akses sanitasi	5	Mutlak
6	Penimbangan balita	5	Mutlak
7	Kunjungan neonatal	5	Mutlak
8	Imunisasi lengkap	5	Mutlak
9	Rasio jumlah dokter dengan jumlah puskesmas	5	Mutlak
10	Rasio jumlah bidan dengan jumlah desa	5	Mutlak
11	Persalinan oleh tenaga kesehatan	5	Mutlak
12	Balita gemuk	4	Penting
13	Diare	4	Penting
14	Hipertensi	4	Penting
15	Pneumonia	4	Penting
16	Perilaku cuci tangan	4	Penting
17	Gangguan mental	3	Perlu
18	Konsumsi tembakau	3	Perlu
19	Prevalensi sakit gigi dan mulut	3	Perlu
20	Asma	3	Perlu



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

No	Indikator	Bobot	Kategori Bobot
21	Disabilitas	3	Perlu
22	Cedera	3	Perlu
23	Sakit sendi	3	Perlu
24	ISPA(Infeksi Saluran Pernafasan Akut)	3	Perlu

### 3.1.1 Definisi Operasional Indikator IPKM 2007

1. Balita gizi buruk dan kurang  
Perbandingan berat badan dan umur. Buruk dan kurang jika mempunyai nilai *Z score* kurang dari -2 SD.
2. Balita sangat pendek dan pendek  
Perbandingan tinggi badan dan umur. Sangat pendek dan pendek jika mempunyai nilai *Z score* kurang dari -2 SD.
3. Balita sangat kurus dan kurus  
Perbandingan tinggi badan dan berat badan. Sangat kurus dan kurus jika mempunyai nilai *Z score* kurang dari -2 SD.
4. Akses air bersih  
Penggunaan air perkapita dalam rumah tangga. Akses air baik jika rumah tangga minimal menggunakan 20 liter per orang per hari.
5. Akses sanitasi  
Menggunakan sendiri fasilitas tempat buang air besar dan jenis kloset leher angsa.
6. Penimbangan balita  
Balita yang dalam 6 bulan terakhir ditimbang. Baik jika pernah ditimbang.
7. Kunjungan neonatal
  - a. Bayi umur di bawah 12 bulan yang pernah mendapat pelayanan kesehatan dalam 1-7 hari pertama setelah lahir. (Data 2007)
  - b. Balita yang pernah mendapat pelayanan kesehatan dalam 1-7 hari setelah lahir. (Data 2013)
8. Imunisasi lengkap
  - a. Imunisasi yang telah diperoleh anak umur 12-23 bulan. Lengkap jika anak tersebut telah diimunisasi 1 kali BCG, 3 kali DPT, dan minimal 3 kali Polio, dan 1 kali campak. (Data 2007)
  - b. Imunisasi yang telah diperoleh anak umur 12-59 bulan. Lengkap jika anak tersebut telah diimunisasi 1 kali BCG, 3 kali DPT, dan minimal 3 kali Polio, dan 1 kali campak. (Data 2013)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

9. Rasio jumlah dokter dengan jumlah puskesmas  
Perbandingan jumlah dokter dan jumlah puskesmas dalam satu kabupaten/ kota. Baik jika minimal rasio 10 dokter per puskesmas.
10. Rasio jumlah bidan dengan jumlah desa  
Perbandingan jumlah bidan dan jumlah desa dalam satu kabupaten/ kota. Baik jika minimal rasio 3 bidan per desa.
11. Persalinan oleh tenaga kesehatan
  - a. Penolong pertama dalam persalinan (penolong persalinan yang pertama kali diakses oleh ibu balita) dengan unit analisis balita. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, bidan, dan tenaga paramedis. (Data 2007)
  - b. Jenis tenaga kesehatan tertinggi yang menolong persalinan ibu dengan unit analisis anak di bawah tiga tahun. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter kandungan, dokter, dan bidan. (Data 2013)
12. Balita gemuk  
Perbandingan berat badan dan tinggi badan. Gemuk jika mempunyai nilai *Z score* di atas 2 SD.
13. Diare  
Penduduk semua umur yang didiagnosis diare atau mengalami gejala diare dalam 1 bulan terakhir.
14. Hipertensi  
Penduduk umur 15 tahun yang diperiksa sistol dan diastolnya pada saat penelitian. Hipertensi jika sistol  $\geq 140$  mmHg atau diastol  $\geq 90$  mmHg.
15. Pneumonia  
Penduduk semua umur yang didiagnosis pneumonia atau mengalami gejala pneumonia dalam 1 bulan terakhir.
16. Perilaku cuci tangan  
Kebiasaan penduduk umur 10 tahun ke atas mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan baik jika mencuci tangan menggunakan sabun pada saat sebelum makan dan sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang binatang (unggas, kucing, anjing) dan setelah buang air besar/setelah menceboki bayi.
17. Kesehatan mental  
Kondisi kesehatan jiwa pada penduduk umur 15 tahun ke atas berdasarkan skor pertanyaan SRQ-20 (*Self Reporting Questionnaire*). Kesehatan jiwa terganggu jika mempunyai skor 6 ke atas.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

18. Perilaku konsumsi tembakau

- a. Kebiasaan merokok atau mengunyah tembakau pada penduduk umur 15 tahun ke atas selama 1 bulan terakhir. Kebiasaan buruk jika dilakukan setiap hari atau kadang-kadang. (Data 2007)
- b. Kebiasaan merokok atau mengunyah tembakau pada penduduk umur 10 tahun ke atas selama 1 bulan terakhir. Kebiasaan buruk jika dilakukan setiap hari atau kadang-kadang. (Data 2013)

19. Sakit gigi dan mulut

Penduduk semua umur yang mempunyai masalah dengan gigi dan/ atau mulut dalam 12 bulan terakhir.

20. Asma

Penduduk semua umur yang pernah didiagnosis asma oleh tenaga kesehatan atau mengalami gejala asma.

21. Disabilitas

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai minimal satu keterbatasan (fisik dan mental) dan atau membutuhkan bantuan.

22. Cedera

Penduduk semua umur yang pernah mengalami cedera dalam 12 bulan terakhir sehingga kegiatan sehari-hari terganggu.

23. Sakit Sendi

Penduduk umur 15 tahun ke atas yang didiagnosis menderita penyakit sendi/ rematik/ encok oleh tenaga kesehatan atau pernah mengalami gejala sakit sendi/ rematik/ encok.

24. ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)

Penduduk semua umur yang pernah didiagnosis menderita sakit ISPA oleh tenaga kesehatan atau mengalami gejala sakit ISPA.

### 3.1.2 Formulasi IPKM 2007

Langkah-langkah menggunakan formulasi IPKM 2007:

1. Setiap indikator dianalisis agregat pada level kabupaten/kota untuk mendapatkan angka prevalensi/proporsi/cakupan, untuk selanjutnya disebut nilai indikator.
2. Nilai Indikator yang mempunyai arti negatif dilakukan penyetaraan sehingga indikator mempunyai arti yang positif. Sebagai contoh pada indikator prevalensi dilakukan penyetaraan dengan menggunakan rumus (100-angka prevalensi). Dengan demikian indikator prevalensi tersebut mempunyai arti yang setara dengan cakupan, bahwa semakin tinggi nilai indikator prevalensi yang sudah disetarakan maka semakin baik.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

3. Masing-masing indikator ditentukan nilai bobotnya (lihat Tabel 3.2).
4. Masing-masing nilai indikator yang sudah dilakukan penyetaraan dikalikan dengan nilai bobotnya. Seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan dan menjadi "**total nilai empiris**".
5. Nilai minimum dan maksimum merupakan bagian dari menghitung nilai indeks (Tabel 3.2), mengacu:
  - a. Pada cakupan: nilai minimum=0, dan nilai maksimum=100
  - b. Pada prevalensi: nilai minimum = nilai terendah setelah disetarakan, dan nilai maksimum = 100
  - c. Pada rasio tenaga kesehatan: nilai minimum = 0, dan maksimum = 10.  
Rasio bidan nilai minimum = 0, dan maksimum = 3.

**Tabel 3.2.** Nilai Standar Minimum dan Maksimum Indikator IPKM 2007

No	Indikator	Prevalensi (data kabupaten terburuk)	Prevelensi Penyetaraan (100- a)	Standar	
				Minimum	Maksimum
		a	b	c	d
1	Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang	48,74	51,26	51,26	100
2	Prevalensi Balita sangat pendek dan pendek	67,39	32,61	32,61	100
3	Prevalensi Balita sangat kurus dan kurus	41,99	58,01	58,01	100
4	Cakupan Akses air bersih	-	-	0	100
5	Cakupan Akses sanitasi	-	-	0	100
6	Cakupan penimbangan balita	-	-	0	100
7	Cakupan pemeriksaan neonatal	-	-	0	100
8	Cakupan imunisasi lengkap	-	-	0	100
9	Kecukupan jumlah dokter per desa	-	-	0	10
10	Kecukupan jumlah bidan per desa	-	-	0	3
11	Cakupan persalinan oleh nakes	-	-	0	100
12	Prevalensi Balita gemuk	42,19	57,81	57,81	100
13	Prevalensi Diare	38,22	61,78	61,78	100
14	Prevalensi Hipertensi	50,94	49,06	49,06	100
15	Prevalensi Pneumonia	18,53	81,47	81,47	100
16	Proporsi perilaku cuci tangan			0	100
17	Prevalensi gangguan mental	32,78	67,22	67,22	100
18	Proporsi merokok tiap hari	56,71	43,29	43,29	100
19	Prevalensi sakit gigi dan mulut	51,04	48,96	48,96	100
20	Prevalensi asma	13,60	86,40	86,40	100
21	Prevalensi disabilitas	55,37	44,63	44,63	100
22	Prevalensi cedera	27,04	72,96	72,96	100





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No	Indikator	Prevalensi	Prevelensi	Standar	
		(data	Penyetaraan	Minimum	Maksimum
		kabupaten	(100- a)		
		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>
23	Prevalensi sakit sendi	57,49	42,51	42,51	100
24	Prevalensi ISPA	63,61	36,39	36,39	100

6. Masing-masing nilai minimum dan maksimum dikalikan dengan bobot. Kemudian hasil perkalian masing-masing nilai tersebut dijumlahkan sehingga didapatkan “**total nilai minimum**” dan “**total nilai maksimum**”.
7. Tahap selanjutnya untuk mendapatkan nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{(\text{total nilai empiris} - \text{total nilai minimum})}{(\text{total nilai maksimum} - \text{total nilai minimum})}$$

### 3.2 Perbandingan IPKM 2007 dan IPKM tahun 2013 (model 2007)

Model IPKM 2007 diterapkan dengan menggunakan data Riskesdas 2013 dan Podes 2011. Secara umum skor IPKM tahun 2013 meningkat dibandingkan IPKM 2007. Besaran peningkatan tersebut tidak merata, sehingga menyebabkan perubahan peringkat antar kabupaten/ kota. Skor yang diperoleh dari tahun 2007 dan 2013 dilakukan perbandingan untuk melihat perubahan yang dimiliki masing-masing kabupaten/ kota. Hasil kabupaten/ kota yang dilihat perubahannya sejumlah 440 kabupaten/ kota, karena 57 kabupaten/ kota lainnya merupakan pemekaran yang belum ada pada tahun 2007. Perubahan yang dibandingkan berdasarkan skor dan peringkat. Kolom perubahan skor menjelaskan perbandingan skor IPKM untuk tahun 2007 dan tahun 2013. Kolom perubahan peringkat menjelaskan perbandingan peringkat kabupaten/ kota yang dicapai pada tahun 2007 dan 2013. Berikut rincian status perubahan rangking pada tahun 2007 dan 2013 menurut kelompok provinsi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

**Tabel 3.3. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Aceh**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
1101	KABUPATEN SIMEULUE	0.4387	0.6845	Naik	344	219	Naik
1102	KABUPATEN ACEH SINGKIL	0.4468	0.6545	Naik	321	302	Naik
1103	KABUPATEN ACEH SELATAN	0.3920	0.5554	Naik	393	416	Turun
1104	KABUPATEN ACEH TENGGARA	0.3929	0.7003	Naik	391	180	Naik
1105	KABUPATEN ACEH TIMUR	0.4259	0.5896	Naik	360	399	Turun
1106	KABUPATEN ACEH TENGAH	0.5243	0.6514	Naik	192	309	Turun
1107	KABUPATEN ACEH BARAT	0.3780	0.6075	Naik	404	379	Naik
1108	KABUPATEN ACEH BESAR	0.4897	0.7361	Naik	245	87	Naik
1109	KABUPATEN PIDIE	0.4796	0.6206	Naik	260	358	Turun
1110	KABUPATEN BIREUEN	0.4846	0.6501	Naik	253	311	Turun
1111	KABUPATEN ACEH UTARA	0.3977	0.6020	Naik	389	385	Naik
1112	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	0.4891	0.5915	Naik	246	397	Turun
1113	KABUPATEN GAYO LUES	0.2713	0.6176	Naik	439	364	Naik
1114	KABUPATEN ACEH TAMIANG	0.5113	0.6832	Naik	219	224	Turun
1115	KABUPATEN NAGAN RAYA	0.3889	0.5818	Naik	396	404	Turun
1116	KABUPATEN ACEH JAYA	0.3731	0.7059	Naik	410	160	Naik
1117	KABUPATEN BENER MERIAH	0.4700	0.6309	Naik	279	346	Turun
1118	KABUPATEN PIDIE JAYA	-	0.6454	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1171	KOTA BANDA ACEH	0.5930	0.7904	Naik	98	7	Naik
1172	KOTA SABANG	0.6342	0.7507	Naik	40	51	Turun
1173	KOTA LANGSA	0.5241	0.7389	Naik	194	79	Naik
1174	KOTA LHOKSEUMAWA	0.5199	0.7120	Naik	205	145	Naik
1175	KOTA SUBULUSSALAM	-	0.5809	Kota baru	-	-	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Aceh seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 10 kabupaten/ kota dari 21 kabupaten/ kota pada tahun 2013 mengalami penurunan peringkat. Kenaikan peringkat yang mencolok terjadi di Kabupaten Aceh Jaya.

**Tabel 3.4. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Sumatera Utara**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1201	KABUPATEN NIAS	0.3334	0.5411	Naik	425	420	Naik
1202	KABUPATEN MANDAILING NATAL	0.3595	0.6107	Naik	421	377	Naik
1203	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	0.4300	0.6499	Naik	356	313	Naik
1204	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	0.4021	0.5338	Naik	386	424	Turun
1205	KABUPATEN TAPANULI UTARA	0.4354	0.6740	Naik	349	249	Naik
1206	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	0.5554	0.7290	Naik	143	104	Naik
1207	KABUPATEN LABUHAN BATU	0.5052	0.7041	Naik	226	167	Naik
1208	KABUPATEN ASAHAN	0.5388	0.7046	Naik	172	164	Naik
1209	KABUPATEN SIMALUNGUN	0.4679	0.7022	Naik	282	171	Naik
1210	KABUPATEN DAIRI	0.4824	0.6624	Naik	257	278	Turun
1211	KABUPATEN KARO	0.5630	0.7016	Naik	135	173	Turun
1213	KABUPATEN LANGKAT	0.5280	0.6826	Naik	189	229	Turun
1214	KABUPATEN NIAS SELATAN	0.2913	0.5207	Naik	435	430	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1215	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	0.4454	0.6918	Naik	327	200	Naik
1216	KABUPATEN PAKPAK BARAT	0.4095	0.6405	Naik	376	324	Naik
1218	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	0.5683	0.6897	Naik	130	206	Turun
1219	KABUPATEN BATU BARA	-	0.6951	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1220	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	-	0.6059	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1221	KABUPATEN PADANG LAWAS	-	0.5447	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1222	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	-	0.6835	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1223	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	-	0.6974	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1224	KABUPATEN NIAS UTARA	-	0.5886	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1225	KABUPATEN NIAS BARAT	-	0.4701	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1271	KOTA SIBOLGA	0.4673	0.7292	Naik	285	103	Naik
1272	KOTA TANJUNG BALAI	0.5581	0.7088	Naik	140	153	Turun
1273	KOTA PEMATANG SIANTAR	0.6443	0.7351	Naik	31	88	Turun
1274	KOTA TEBING TINGGI	0.5949	0.7286	Naik	95	106	Turun
1275	KOTA MEDAN	0.6593	0.7474	Naik	14	58	Turun
1276	KOTA BINJAI	0.6005	0.7480	Naik	86	56	Naik
1277	KOTA PADANG SIDEMPUNAN	0.5686	0.6502	Naik	129	310	Turun
1278	KOTA GUNUNGSITOLI	-	0.5683	Kota baru	-	-	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Sumatera Utara seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 11 kabupaten/ kota dari 25 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

**Tabel 3.5. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Sumatera Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1301	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	0.3734	0.5283	Naik	409	427	Turun
1302	KABUPATEN PESISIR SELATAN	0.4083	0.6465	Naik	380	318	Naik
1303	KABUPATEN SOLOK	0.4875	0.6336	Naik	247	340	Turun
1304	KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG	0.4613	0.6577	Naik	298	296	Naik
1305	KABUPATEN TANAH DATAR	0.4797	0.7027	Naik	259	169	Naik
1306	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	0.4603	0.6536	Naik	301	303	Turun
1307	KABUPATEN AGAM	0.5237	0.7240	Naik	195	115	Naik
1308	KABUPATEN LIMA PULUH KOTO	0.4453	0.6670	Naik	328	268	Naik
1309	KABUPATEN PASAMAN	0.4180	0.6156	Naik	367	367	Tetap
1310	KABUPATEN SOLOK SELATAN	0.3766	0.7061	Naik	407	158	Naik
1311	KABUPATEN DHARMASRAYA	0.4765	0.6902	Naik	270	203	Naik
1312	KABUPATEN PASAMAN BARAT	0.4093	0.6116	Naik	378	375	Naik
1371	KOTA PADANG	0.6043	0.7419	Naik	78	72	Naik
1372	KOTA SOLOK	0.6240	0.7162	Naik	50	132	Turun
1373	KOTA SAWAHLUNTO	0.6001	0.7713	Naik	87	24	Naik
1374	KOTA PADANG PANJANG	0.6397	0.7454	Naik	34	64	Turun
1375	KOTA BUKIT TINGGI	0.6407	0.7661	Naik	33	29	Naik
1376	KOTA PAYAKUMBUH	0.6185	0.7445	Naik	63	67	Turun
1377	KOTA PARIAMAN	0.5551	0.6866	Naik	144	215	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Sumatera Barat seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 7 kabupaten/ kota dari 19 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan 1 kabupaten tidak mengalami perubahan peringkat. Satu kabupaten yang mengalami kenaikan mencolok adalah Kabupaten Solok Selatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

**Tabel 3.6. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Riau**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1401	KABUPATEN KUANTAN SENGGIGI	0.4419	0.6633	Naik	334	276	Naik
1402	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	0.4587	0.6820	Naik	305	231	Naik
1403	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	0.3710	0.6018	Naik	413	386	Naik
1404	KABUPATEN PELALAWAN	0.4767	0.7119	Naik	268	146	Naik
1405	KABUPATEN S I A K	0.5620	0.7189	Naik	137	127	Naik
1406	KABUPATEN KAMPAR	0.5094	0.7517	Naik	220	46	Naik
1407	KABUPATEN ROKAN HULU	0.5394	0.6704	Naik	169	256	Turun
1408	KABUPATEN BENGKALIS	0.4166	0.7010	Naik	369	174	Naik
1409	KABUPATEN ROKAN HILIR	0.4349	0.6746	Naik	350	248	Naik
1410	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	-	0.6208	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1471	KOTA PEKAN BARU	0.5898	0.7721	Naik	105	21	Naik
1473	KOTA DUMAI	0.5496	0.7588	Naik	150	38	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Riau seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 1 kabupaten/ kota dari 11 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Kabupaten Kampar mengalami kenaikan yang bermakna.

**Tabel 3.7. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Jambi**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1501	KABUPATEN KERINCI	0.4253	0.6563	Naik	362	297	Naik
1502	KABUPATEN MERANGIN	0.4940	0.6739	Naik	240	250	Turun
1503	KABUPATEN SAROLANGUN	0.3697	0.7836	Naik	414	13	Naik
1504	KABUPATEN BATANG HARI	0.5025	0.7180	Naik	230	129	Naik
1505	KABUPATEN MUARO JAMBI	0.5187	0.7101	Naik	206	149	Naik
1506	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	0.4175	0.6335	Naik	368	342	Naik
1507	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	0.4824	0.6478	Naik	256	316	Turun
1508	KABUPATEN T E B O	0.4954	0.6684	Naik	238	264	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1509	KABUPATEN BUNGO	0.4377	0.6600	Naik	346	288	Naik
1571	KOTA JAMBI	0.6565	0.7328	Naik	17	93	Turun
1572	KOTA SUNGAI PENUH	-	0.7135	Kota baru	-	-	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Jambi seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 4 kabupaten/ kota dari 10 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hanya satu kabupaten mengalami kenaikan yang bermakna yaitu Kabupaten Sarolangun.

**Tabel 3.8. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Sumatera Selatan**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1601	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	0.5872	0.6776	Naik	107	241	Turun
1602	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	0.4712	0.6986	Naik	276	186	Naik
1603	KABUPATEN MUARA ENIM	0.4780	0.6829	Naik	263	226	Naik
1604	KABUPATEN LAHAT	0.4916	0.6816	Naik	243	232	Naik
1605	KABUPATEN MUSI RAWAS	0.4408	0.6556	Naik	338	299	Naik
1606	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	0.4064	0.6758	Naik	384	246	Naik
1607	KABUPATEN BANYUASIN	0.5158	0.6582	Naik	212	293	Turun
1608	KABUPATEN OKU SELATAN	0.4195	0.5724	Naik	366	412	Turun
1609	KABUPATEN OKU TIMUR	0.5730	0.7025	Naik	123	170	Turun
1610	KABUPATEN OGAN ILIR	0.4733	0.6839	Naik	275	221	Naik
1611	KABUPATEN EMPAT LAWANG	-	0.6460	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1671	KOTA PALEMBANG	0.6113	0.7478	Naik	71	57	Naik
1672	KOTA PRABUMULIH	0.6063	0.7137	Naik	74	139	Turun
1673	KOTA PAGAR ALAM	0.5594	0.7309	Naik	138	99	Naik
1674	KOTA LUBUK LINGGAU	0.6238	0.7073	Naik	51	157	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Sumatera Selatan seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 6 kabupaten/ kota dari 14 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir setengahnya mengalami penurunan dan tidak ada yang mengalami kenaikan yang bermakna.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

**Tabel 3.9. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Bengkulu**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1701	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	0.4522	0.6555	Naik	310	300	Naik
1702	KABUPATEN REJANG LEBONG	0.5032	0.7053	Naik	228	162	Naik
1703	KABUPATEN BENGKULU UTARA	0.4605	0.6920	Naik	300	199	Naik
1704	KABUPATEN KAUR	0.4508	0.6186	Naik	315	363	Turun
1705	KABUPATEN SELUMA	0.4748	0.6653	Naik	274	270	Naik
1706	KABUPATEN MUKO MUKO	0.5331	0.6924	Naik	183	197	Turun
1707	KABUPATEN LEBONG	0.4079	0.6787	Naik	381	238	Naik
1708	KABUPATEN KEPAHANG	0.5017	0.6381	Naik	232	332	Turun
1709	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	-	0.7190	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1771	KOTA BENGKULU	0.6305	0.7711	Naik	46	25	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Bengkulu seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Tiga kabupaten/ kota dari 9 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan yang bermakna.

**Tabel 3.10. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Lampung**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1801	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	0.4872	0.6413	Naik	248	321	Turun
1802	KABUPATEN TANGGAMUS	0.4967	0.6672	Naik	236	267	Turun
1803	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	0.5403	0.7044	Naik	167	166	Naik
1804	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	0.5209	0.6890	Naik	200	210	Turun
1805	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	0.5204	0.7086	Naik	203	155	Naik
1806	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	0.4513	0.7046	Naik	312	165	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1807	KABUPATEN WAY KANAN	0.4869	0.6814	Naik	249	234	Naik
1809	KABUPATEN PESAWARAN	-	0.6991	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1810	KABUPATEN PRINGSEWU	-	0.7003	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1811	KABUPATEN MESUJI	-	0.6166	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1812	KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT	-	0.7060	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
1871	KOTA BANDAR LAMPUNG	0.5415	0.7610	Naik	165	35	Naik
1872	KOTA METRO	0.6728	0.8131	Naik	11	3	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Lampung seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 4 kabupaten/ kota dari 10 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir setengahnya mengalami penurunan dan tidak ada yang mengalami kenaikan yang bermakna.

**Tabel 3.11. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Bangka Belitung**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
1901	KABUPATEN BANGKA	0.5333	0.7473	Naik	182	59	Naik
1902	KABUPATEN BELITUNG	0.5386	0.7365	Naik	173	86	Naik
1903	KABUPATEN BANGKA BARAT	0.4392	0.6587	Naik	342	292	Naik
1904	KABUPATEN BANGKA TENGAH	0.5304	0.7125	Naik	185	143	Naik
1905	KABUPATEN BANGKA SELATAN	0.4463	0.6751	Naik	323	247	Naik
1906	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	0.5126	0.7311	Naik	216	98	Naik
1971	KOTA PANGKAL PINANG	0.5674	0.7401	Naik	132	75	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Bangka Belitung seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor dan kenaikan peringkat. Kenaikan skor cukup baik.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-25-

**Tabel 3.12. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Kepulauan Riau**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
2101	KABUPATEN KARIMUN	0.5961	0.7655	Naik	93	30	Naik
2102	KABUPATEN BINTAN	0.5497	0.7691	Naik	149	27	Naik
2103	KABUPATEN NATUNA	0.4580	0.6598	Naik	306	290	Naik
2104	KABUPATEN LINGGA	0.4768	0.6934	Naik	267	195	Naik
2105	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	-	0.6335	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
2171	KOTA BATAM	0.6034	0.7778	Naik	79	16	Naik
2172	KOTA TANJUNG PINANG	0.6236	0.7631	Naik	52	32	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Kepulauan Riau seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor dan kenaikan peringkat. Empat kabupaten/ kota berada dalam posisi 50 terbaik.

**Tabel 3.13. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi DKI Jakarta**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
3101	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	0.6199	0.7850	Naik	60	12	Naik
3171	KOTA JAKARTA SELATAN	0.6555	0.7767	Naik	19	19	Tetap
3172	KOTA JAKARTA TIMUR	0.6172	0.7623	Naik	64	34	Naik
3173	KOTA JAKARTA PUSAT	0.5915	0.7147	Naik	102	135	Turun
3174	KOTA JAKARTA BARAT	0.6160	0.7773	Naik	66	17	Naik
3175	KOTA JAKARTA UTARA	0.5740	0.7277	Naik	119	107	Naik

Kesimpulan: di Provinsi DKI Jakarta seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 1 kota dari 6 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan 1 kabupaten tidak mengalami perubahan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

**Tabel 3.14. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Jawa Barat**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
3201	KABUPATEN BOGOR	0.4672	0.6612	Naik	287	283	Naik
3202	KABUPATEN SUKABUMI	0.4376	0.6761	Naik	347	245	Naik
3203	KABUPATEN CIANJUR	0.3673	0.5975	Naik	416	392	Naik
3204	KABUPATEN BANDUNG	0.5180	0.6524	Naik	208	305	Turun
3205	KABUPATEN GARUT	0.4118	0.6237	Naik	374	354	Naik
3206	KABUPATEN TASIKMALAYA	0.4242	0.6196	Naik	364	360	Naik
3207	KABUPATEN CIAMIS	0.5393	0.6841	Naik	170	220	Turun
3208	KABUPATEN KUNINGAN	0.6568	0.7644	Naik	16	31	Turun
3209	KABUPATEN CIREBON	0.5465	0.7427	Naik	155	71	Naik
3210	KABUPATEN UPATENMAJALENGKA	0.4866	0.6981	Naik	251	187	Naik
3211	KABUPATEN SUMEDANG	0.5915	0.6994	Naik	101	183	Turun
3212	KABUPATEN INDRAMAYU	0.5145	0.7058	Naik	214	161	Naik
3213	KABUPATEN SUBANG	0.5455	0.6612	Naik	159	284	Turun
3214	KABUPATEN PURWAKARTA	0.4452	0.7081	Naik	329	156	Naik
3215	KABUPATEN KARAWANG	0.5233	0.7132	Naik	196	140	Naik
3216	KABUPATEN BEKASI	0.5275	0.7376	Naik	190	82	Naik
3217	KABUPATEN BANDUNG BARAT	-	0.6193	Kabupate n baru	-	-	Kabupate n baru
3271	KOTA BOGOR	0.6110	0.6974	Naik	72	188	Turun
3272	KOTA SUKABUMI	0.5821	0.6807	Naik	113	236	Turun
3273	KOTA BANDUNG	0.6364	0.7459	Naik	37	63	Turun
3274	KOTA CIREBON	0.6168	0.7716	Naik	65	23	Naik
3275	KOTA BEKASI	0.6218	0.7473	Naik	55	60	Turun
3276	KOTA DEPOK	0.5812	0.7630	Naik	114	33	Naik
3277	KOTA CIMAHI	0.6489	0.7302	Naik	25	101	Turun
3278	KOTA TASIKMALAYA	0.5357	0.7003	Naik	177	181	Turun
3279	KOTA BANJAR	0.5994	0.7019	Naik	89	172	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

Kesimpulan: di Provinsi Jawa Barat seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Penurunan peringkat terjadi pada 12 kabupaten/ kota dari 25 kabupaten/ kota. Tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan peringkat yang bermakna.

**Tabel 3.15. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
3301	KABUPATEN CILACAP	0.6026	0.7188	Naik	80	128	Turun
3302	KABUPATEN BANYUMAS	0.6012	0.7370	Naik	83	84	Turun
3303	KABUPATEN PURBALINGGA	0.5302	0.6814	Naik	187	235	Turun
3304	KABUPATEN BANJARNEGARA	0.4927	0.6702	Naik	242	257	Turun
3305	KABUPATEN KEBUMEN	0.5629	0.7351	Naik	136	89	Naik
3306	KABUPATEN PURWOREJO	0.5491	0.7201	Naik	152	124	Naik
3307	KABUPATEN WONOSOBO	0.5700	0.6891	Naik	127	209	Turun
3308	KABUPATEN MAGELANG	0.6058	0.6955	Naik	75	190	Turun
3309	KABUPATEN BOYOLALI	0.6009	0.7231	Naik	85	118	Turun
3310	KABUPATEN KLATEN	0.5764	0.7516	Naik	118	48	Naik
3311	KABUPATEN SUKOHARJO	0.6855	0.8205	Naik	6	2	Naik
3312	KABUPATEN WONOGIRI	0.6464	0.7270	Naik	29	109	Turun
3313	KABUPATEN KARANGANYAR	0.6153	0.7517	Naik	69	47	Naik
3314	KABUPATEN SRAGEN	0.5768	0.7265	Naik	117	112	Naik
3315	KABUPATEN GROBOGAN	0.4704	0.6831	Naik	278	225	Naik
3316	KABUPATEN BLORA	0.5283	0.6698	Naik	188	258	Turun
3317	KABUPATEN REMBANG	0.5397	0.7461	Naik	168	62	Naik
3318	KABUPATEN PATI	0.5956	0.7235	Naik	94	117	Turun
3319	KABUPATEN KUDUS	0.5963	0.7589	Naik	92	37	Naik
3320	KABUPATEN JEPARA	0.5419	0.6829	Naik	162	227	Turun
3321	KABUPATEN DEMAK	0.5303	0.6938	Naik	186	193	Turun
3322	KABUPATEN SEMARANG	0.6206	0.7441	Naik	58	68	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-28-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	0.5900	0.6898	Naik	104	205	Turun
3324	KABUPATEN KENDAL	0.5455	0.7198	Naik	157	125	Naik
3325	KABUPATEN BATANG	0.5374	0.7005	Naik	175	179	Turun
3326	KABUPATEN PEKALONGAN	0.5548	0.7053	Naik	145	163	Turun
3327	KABUPATEN PEMALANG	0.4928	0.6709	Naik	241	255	Turun
3328	KABUPATEN TEGAL	0.5711	0.6596	Naik	126	291	Turun
3329	KABUPATEN BREBES	0.4640	0.6163	Naik	292	366	Turun
3371	KOTA MAGELANG	0.7090	0.7597	Naik	1	36	Turun
3372	KOTA SURAKARTA	0.6339	0.7508	Naik	42	50	Turun
3373	KOTA SALATIGA	0.7045	0.7957	Naik	3	5	Turun
3374	KOTA SEMARANG	0.5930	0.7581	Naik	99	41	Naik
3375	KOTA PEKALONGAN	0.6315	0.7289	Naik	45	105	Turun
3376	KOTA TEGAL	0.5640	0.7378	Naik	134	81	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Jawa Tengah seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Hal yang harus menjadi perhatian adalah sebanyak 23 kabupaten/ kota dari 35 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat.

**Tabel 3.16. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi D.I. Yogyakarta**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
3401	KABUPATEN KULON PROGO	0.6284	0.7325	Naik	47	94	Turun
3402	KABUPATEN BANTUL	0.6915	0.7449	Naik	5	66	Turun
3403	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	0.6268	0.6837	Naik	49	222	Turun
3404	KABUPATEN SLEMAN	0.6803	0.7809	Naik	7	15	Turun
3471	KOTA YOGYAKARTA	0.6948	0.7319	Naik	4	97	Turun

Kesimpulan: di Provinsi D.I Yogyakarta seluruh kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat walau seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Hal ini harus menjadi perhatian terutama Kabupaten Gunung Kidul yang hanya sedikit kenaikan skornya sehingga mengalami penurunan peringkat yang cukup banyak.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-29-

**Tabel 3.17. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Jawa Timur**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
3501	KABUPATEN PACITAN	0.5909	0.7006	Naik	103	178	Turun
3502	KABUPATEN PONOROGO	0.5925	0.7440	Naik	100	70	Naik
3503	KABUPATEN TRENGGALEK	0.5687	0.7127	Naik	128	142	Turun
3504	KABUPATEN TULUNGAGUNG	0.6466	0.7343	Naik	28	90	Turun
3505	KABUPATEN BLITAR	0.5947	0.6948	Naik	97	191	Turun
3506	KABUPATEN KEDIRI	0.6213	0.7162	Naik	56	133	Turun
3507	KABUPATEN MALANG	0.5408	0.6897	Naik	166	207	Turun
3508	KABUPATEN LUMAJANG	0.5204	0.6581	Naik	202	294	Turun
3509	KABUPATEN JEMBER	0.5134	0.6391	Naik	215	330	Turun
3510	KABUPATEN BANYUWANGI	0.5416	0.6878	Naik	164	213	Turun
3511	KABUPATEN BONDOWOSO	0.5032	0.6083	Naik	229	378	Turun
3512	KABUPATEN SITUBONDO	0.4984	0.6517	Naik	235	307	Turun
3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	0.4538	0.6405	Naik	309	325	Turun
3514	KABUPATEN PASURUAN	0.5509	0.6778	Naik	147	240	Turun
3515	KABUPATEN SIDOARJO	0.6320	0.7395	Naik	44	78	Turun
3516	KABUPATEN MOJOKERTO	0.6192	0.7246	Naik	62	114	Turun
3517	KABUPATEN JOMBANG	0.6092	0.7270	Naik	73	110	Turun
3518	KABUPATEN NGANJUK	0.6235	0.7556	Naik	53	44	Naik
3519	KABUPATEN MADIUN	0.6339	0.7269	Naik	41	111	Turun
3520	KABUPATEN MAGETAN	0.6204	0.7339	Naik	59	91	Turun
3521	KABUPATEN NGAWI	0.6160	0.7132	Naik	67	141	Turun
3522	KABUPATEN BOJONEGORO	0.5738	0.6772	Naik	120	242	Turun
3523	KABUPATEN TUBAN	0.5453	0.6849	Naik	160	217	Turun
3524	KABUPATEN LAMONGAN	0.5676	0.7116	Naik	131	147	Turun





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-30-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
3525	KABUPATEN GRESIK	0.6113	0.7298	Naik	70	102	Turun
3526	KABUPATEN BANGKALAN	0.4596	0.6381	Naik	302	333	Turun
3527	KABUPATEN SAMPANG	0.3277	0.6643	Naik	426	272	Naik
3528	KABUPATEN PAMEKASAN	0.4158	0.5874	Naik	371	400	Turun
3529	KABUPATEN SUMENEP	0.4212	0.6002	Naik	365	390	Turun
3571	KOTA KEDIRI	0.6373	0.7830	Naik	35	14	Naik
3572	KOTA BLITAR	0.6461	0.7718	Naik	30	22	Naik
3573	KOTA MALANG	0.6522	0.7588	Naik	22	39	Turun
3574	KOTA PROBOLINGGO	0.5991	0.7250	Naik	90	113	Turun
3575	KOTA PASURUAN	0.6563	0.7388	Naik	18	80	Turun
3576	KOTA MOJOKERTO	0.6530	0.7490	Naik	20	54	Turun
3577	KOTA MADIUN	0.6790	0.7900	Naik	10	8	Naik
3578	KOTA SURABAYA	0.6524	0.7406	Naik	21	74	Turun
3579	KOTA BATU	0.6589	0.7584	Naik	15	40	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Jawa Timur seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor dan 32 kabupaten/ kota dari 38 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir semua kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat, walaupun Kota Madiun masuk dalam peringkat 10 terbaik.

**Tabel 3.18. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Banten**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
3601	KABUPATEN PANDEGLANG	0.3611	0.6384	Naik	420	331	Naik
3602	KABUPATEN LEBAK	0.4121	0.6816	Naik	373	233	Naik
3603	KABUPATEN TANGERANG	0.5554	0.7088	Naik	141	154	Turun
3604	KABUPATEN SERANG	0.4380	0.6630	Naik	345	277	Naik
3671	KOTA TANGERANG	0.6222	0.7561	Naik	54	42	Naik
3672	KOTA CILEGON	0.5350	0.7501	Naik	179	52	Naik
3673	KOTA SERANG	-	0.7251	Kota baru	-	-	Kota baru
3674	KOTA TANGERANG SELATAN	-	0.8069	Kota baru	-	-	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Banten seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 1 kabupaten dari 6 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan tidak ada kabupaten/ kota mengalami kenaikan peringkat yang bermakna.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-31-

**Tabel 3.19. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Bali**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
5101	KABUPATEN JEMBRANA	0.6199	0.7272	Naik	61	108	Turun
5102	KABUPATEN TABANAN	0.6638	0.7866	Naik	13	10	Naik
5103	KABUPATEN BADUNG	0.6722	0.7897	Naik	12	9	Naik
5104	KABUPATEN GIANYAR	0.7065	0.8032	Naik	2	4	Turun
5105	KABUPATEN KLUNGKUNG	0.5843	0.7219	Naik	110	120	Turun
5106	KABUPATEN BANGLI	0.5369	0.6910	Naik	176	202	Turun
5107	KABUPATEN KARANG ASEM	0.5202	0.6860	Naik	204	216	Turun
5108	KABUPATEN BULELENG	0.5114	0.7146	Naik	218	136	Naik
5171	KOTA DENPASAR	0.6796	0.8327	Naik	9	1	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Bali seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 5 kabupaten/ kota dari 9 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Secara nasional, 4 kabupaten/ kota di Bali termasuk dalam 10 peringkat terbaik.

**Tabel 3.20. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
5201	KABUPATEN LOMBOK BARAT	0.4628	0.6639	Naik	296	274	Naik
5202	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	0.4673	0.6127	Naik	286	372	Turun
5203	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0.4959	0.6926	Naik	237	196	Naik
5204	KABUPATEN SUMBAWA	0.4593	0.7211	Naik	303	122	Naik
5205	KABUPATEN DOMPU	0.4418	0.6396	Naik	336	328	Naik
5206	KABUPATEN BIMA	0.4673	0.6430	Naik	284	319	Turun
5207	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	0.4999	0.7144	Naik	234	137	Naik
5208	KABUPATEN LOMBOK UTARA	-	0.6130	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
5271	KOTA MATARAM	0.6274	0.7491	Naik	48	53	Turun
5272	KOTA BIMA	0.4854	0.6689	Naik	252	262	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-32-

Kesimpulan: di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 4 kabupaten/ kota dari 9 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan hanya Kabupaten Sumbawa yang mengalami kenaikan cukup bermakna.

**Tabel 3.21. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
5301	KABUPATEN SUMBA BARAT	0.3774	0.4947	Naik	406	435	Turun
5302	KABUPATEN SUMBA TIMUR	0.3571	0.5792	Naik	422	408	Naik
5303	KABUPATEN KUPANG	0.4161	0.5646	Naik	370	415	Turun
5304	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	0.3868	0.4460	Naik	399	438	Turun
5305	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	0.4509	0.6663	Naik	313	269	Naik
5306	KABUPATEN BELU	0.4592	0.6494	Naik	304	314	Turun
5307	KABUPATEN ALOR	0.3902	0.5652	Naik	395	414	Turun
5308	KABUPATEN LEMBATA	0.4779	0.5759	Naik	264	409	Turun
5309	KABUPATEN FLORES TIMUR	0.5221	0.6609	Naik	197	285	Turun
5310	KABUPATEN SIKKA	0.5034	0.6580	Naik	227	295	Turun
5311	KABUPATEN ENDE	0.4498	0.6027	Naik	316	384	Turun
5312	KABUPATEN NGADA	0.5019	0.6006	Naik	231	388	Turun
5313	KABUPATEN MANGGARAI	0.2832	0.5722	Naik	437	413	Naik
5314	KABUPATEN ROTENDAO	0.3856	0.5435	Naik	401	418	Turun
5315	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	0.3212	0.5340	Naik	427	423	Turun
5316	KABUPATEN SUMBA TENGAH	-	0.4385	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
5317	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	-	0.4218	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
5318	KABUPATEN NAGEKEO	-	0.6119	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
5319	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	-	0.3990	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
5320	KABUPATEN SABU RAJUA	-	0.5110	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-33-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
5371	KOTA KUPANG	0.6439	0.7178	Naik	32	130	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruhnya mengalami kenaikan skor. Sebanyak 13 kabupaten/ kota dari 16 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir seluruh kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan yang bermakna.

**Tabel 3.22. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
6101	KABUPATEN SAMBAS	0.5266	0.6119	Naik	191	373	Turun
6102	KABUPATEN BENGKAYANG	0.4471	0.6481	Naik	319	315	Naik
6103	KABUPATEN LANDAK	0.3829	0.7240	Naik	403	116	Naik
6104	KABUPATEN PONTIANAK	0.5352	0.6560	Naik	178	298	Turun
6105	KABUPATEN SANGGAU	0.5086	0.6696	Naik	223	259	Turun
6106	KABUPATEN KETAPANG	0.4243	0.6835	Naik	363	223	Naik
6107	KABUPATEN SINTANG	0.4794	0.5868	Naik	262	401	Turun
6108	KABUPATEN KAPUAS HULU	0.4070	0.6802	Naik	383	237	Naik
6109	KABUPATEN SEKADAU	0.3957	0.5431	Naik	390	419	Turun
6110	KABUPATEN MELAWI	0.4260	0.6299	Naik	359	348	Naik
6111	KABUPATEN KAYONG UTARA	-	0.5820	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
6112	KABUPATEN KUBU RAYA	-	0.6420	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
6171	KOTA PONTIANAK	0.5714	0.7558	Naik	125	43	Naik
6172	KOTA SINGKAWANG	0.5996	0.7370	Naik	88	85	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Kalimantan Barat seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 5 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Kabupaten/ kota yang mengalami penurunan peringkat, mungkin dapat mengacu pada Kabupaten Landak yang mengalami kenaikan yang bermakna



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-34-

**Tabel 3.23. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
6201	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	0.5505	0.7191	Naik	148	126	Naik
6202	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	0.4694	0.6715	Naik	280	251	Naik
6203	KABUPATEN KAPUAS	0.4071	0.5935	Naik	382	396	Turun
6204	KABUPATEN BARITO SELATAN	0.4419	0.5954	Naik	335	394	Turun
6205	KABUPATEN BARITO UTARA	0.4618	0.6218	Naik	297	357	Turun
6206	KABUPATEN SUKAMARA	0.4457	0.6532	Naik	326	304	Naik
6207	KABUPATEN LAMANDAU	0.4565	0.6341	Naik	307	338	Turun
6208	KABUPATEN SERUYAN	0.4457	0.6849	Naik	325	218	Naik
6209	KABUPATEN KATINGAN	0.4363	0.6051	Naik	348	380	Turun
6210	KABUPATEN PULANG PISAU	0.4461	0.6423	Naik	324	320	Naik
6211	KABUPATEN GUNUNG MAS	0.3861	0.5389	Naik	400	422	Turun
6212	KABUPATEN BARITO TIMUR	0.5467	0.6344	Naik	154	337	Turun
6213	KABUPATEN MURUNG RAYA	0.3528	0.6228	Naik	423	355	Naik
6271	KOTA PALANGKARAYA	0.6052	0.7750	Naik	76	20	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Kalimantan Tengah seluruhnya mengalami kenaikan skor. Sebanyak 7 kabupaten/ kota dari 14 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena setengah kabupaten/ kota mengalami penurunan dan tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan yang bermakna.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

**Tabel 3.24. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
6301	KABUPATEN TANAH LAUT	0.5156	0.6893	Naik	213	208	Naik
6302	KABUPATEN KOTA BARU	0.5120	0.6144	Naik	217	368	Turun
6303	KABUPATEN BANJAR	0.4008	0.5410	Naik	388	421	Turun
6304	KABUPATEN BARITO KUALA	0.4324	0.5813	Naik	353	406	Turun
6305	KABUPATEN TAPIN	0.4688	0.6606	Naik	281	287	Turun
6306	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	0.4756	0.6224	Naik	273	356	Turun
6307	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	0.5455	0.6363	Naik	158	335	Turun
6308	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	0.4709	0.6634	Naik	277	275	Naik
6309	KABUPATEN TABALONG	0.5417	0.6769	Naik	163	244	Turun
6310	KABUPATEN TANAH BUMBU	0.4774	0.6312	Naik	266	345	Turun
6311	KABUPATEN BALANGAN	0.4318	0.6142	Naik	354	370	Turun
6371	KOTA BANJARMASIN	0.5723	0.7229	Naik	124	119	Naik
6372	KOTA BANJAR BARU	0.6347	0.7522	naik	39	45	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Kalimantan Selatan seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 10 kabupaten/ kota dari 13 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir semua kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan yang bermakna.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-36-

**Tabel 3.25. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Kalimantan Timur**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
6401	KABUPATEN PASIR	0.5343	0.6879	Naik	181	212	Turun
6402	KABUPATEN KUTAI BARAT	0.5185	0.6519	Naik	207	306	Turun
6403	KABUPATEN KUTAI	0.5495	0.7009	Naik	151	175	Turun
6404	KABUPATEN KUTAI TIMUR	0.4899	0.7099	Naik	244	150	Naik
6405	KABUPATEN BERAU	0.5983	0.7168	Naik	91	131	Turun
6406	KABUPATEN MALINAU	0.5077	0.6948	Naik	224	192	Naik
6407	KABUPATEN BULUNGAN	0.4094	0.6958	Naik	377	189	Naik
6408	KABUPATEN NUNUKAN	0.4487	0.6711	Naik	317	254	Naik
6409	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	0.5773	0.7324	Naik	116	95	Turun
6410	KABUPATEN TANA TIDUNG	-	0.6981	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
6471	KOTA BALIKPAPAN	0.6801	0.7851	Naik	8	11	Turun
6472	KOTA SAMARINDA	0.5863	0.7516	Naik	108	49	Naik
6473	KOTA TARAKAN	0.6154	0.7144	Naik	68	138	Turun
6474	KOTA BONTANG	0.6514	0.7401	Naik	23	76	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Kalimantan Timur seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 8 kabupaten/ kota dari 13 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena lebih dari setengah kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan mungkin dapat mengacu Kabupaten Bulungan yang mengalami kenaikan cukup bermakna.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-37-

**Tabel 3.26. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Sulawesi Utara**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
7101	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	0.5207	0.6018	Naik	201	387	Turun
7102	KABUPATEN MINAHASA	0.5590	0.7008	Naik	139	176	Turun
7103	KABUPATEN KEP. SANGIHE TALAUD	0.5480	0.6938	Naik	153	194	Turun
7104	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	0.5377	0.6355	Naik	174	336	Turun
7105	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	0.6015	0.7202	Naik	82	123	Turun
7106	KABUPATEN MINAHASA UTARA	0.5654	0.7441	Naik	133	69	Naik
7107	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	0.6232	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
7108	KABUPATEN KEP. SITARO	-	0.7115	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
7109	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	-	0.6881	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
7110	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	0.5910	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
7111	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	-	0.6466	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
7171	KOTA MANADO	0.6502	0.7910	Naik	24	6	Naik
7172	KOTA BITUNG	0.6212	0.7397	Naik	57	77	Turun
7173	KOTA TOMOHON	0.6363	0.7698	Naik	38	26	Naik
7174	KOTA KOTAMOBAGU	-	0.7241	Kota baru	-	-	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Utara seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 6 kabupaten/ kota dari 9 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir setengah kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan yang bermakna.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-38-

**Tabel 3.27. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Sulawesi Tengah**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
7201	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	0.4434	0.5207	Naik	330	431	Turun
7202	KABUPATEN BANGGAI	0.4775	0.6880	Naik	265	211	Naik
7203	KABUPATEN MOROWALI	0.4950	0.6715	Naik	239	252	Turun
7204	KABUPATEN POSO	0.5554	0.6616	Naik	142	281	Turun
7205	KABUPATEN DONGGALA	0.4410	0.5859	Naik	337	402	Turun
7206	KABUPATEN TOLI TOLI	0.4015	0.5730	Naik	387	411	Turun
7207	KABUPATEN BUOL	0.3924	0.6826	Naik	392	230	Naik
7208	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	0.4470	0.6049	Naik	320	381	Turun
7209	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	0.4632	0.5261	Naik	295	428	Turun
7210	KABUPATEN SIGI	-	0.6567	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
7271	KOTA PALU	0.5241	0.7321	Naik	193	96	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Tengah seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Hal ini harus menjadi perhatian karena sebanyak 7 kabupaten/ kota dari 10 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan yang bermakna.

**Tabel 3.28. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
7301	KABUPATEN SELAYAR	0.5441	0.6923	Naik	161	198	Turun
7302	KABUPATEN BULUKUMBA	0.4518	0.6248	Naik	311	353	Turun
7303	KABUPATEN BANTAENG	0.4474	0.5759	Naik	318	410	Turun
7304	KABUPATEN JENEPONTO	0.3506	0.6273	Naik	424	351	Naik
7305	KABUPATEN TAKALAR	0.4765	0.7096	Naik	269	152	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-39-

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPKM 2007</b>	<b>IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Skor</b>	<b>Peringkat 2007</b>	<b>Peringkat 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat</b>
7306	KABUPATEN GOWA	0.4666	0.6407	Naik	290	323	Turun
7307	KABUPATEN SINJAI	0.4430	0.6398	Naik	331	326	Naik
7308	KABUPATEN MAROS	0.4811	0.6781	Naik	258	239	Naik
7309	KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN	0.5349	0.6641	Naik	180	273	Turun
7310	KABUPATEN BARRU	0.5163	0.6992	Naik	210	185	Naik
7311	KABUPATEN BONE	0.4309	0.5948	Naik	355	395	Turun
7312	KABUPATEN SOPPENG	0.6369	0.7463	Naik	36	61	Turun
7313	KABUPATEN WAJO	0.4671	0.6615	Naik	288	282	Naik
7314	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	0.6025	0.7099	Naik	81	151	Turun
7315	KABUPATEN PINRANG	0.5733	0.6285	Naik	121	350	Turun
7316	KABUPATEN ENREKANG	0.5842	0.7035	Naik	111	168	Turun
7317	KABUPATEN LUWU	0.4605	0.5995	Naik	299	391	Turun
7318	KABUPATEN TANA TORAJA	0.4090	0.5964	Naik	379	393	Turun
7322	KABUPATEN LUWU UTARA	0.4757	0.6517	Naik	272	308	Turun
7325	KABUPATEN LUWU TIMUR	0.5317	0.7157	Naik	184	134	Naik
7326	KABUPATEN TORAJA UTARA	-	0.6222	Kabupaten n baru	-	-	Kabupaten baru
7371	KOTA MAKASSAR	0.6481	0.7407	Naik	27	73	Turun
7372	KOTA PARE PARE	0.5823	0.7665	Naik	112	28	Naik
7373	KOTA PALOPO	0.6484	0.6902	Naik	26	204	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Selatan seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 15 kabupaten/ kota dari 23 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena lebih dari setengah kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan yang bermakna.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-40-

**Tabel 3.29. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013  
di Provinsi Sulawesi Tenggara**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
7401	KABUPATEN BUTON	0.4667	0.6192	Naik	289	362	Turun
7402	KABUPATEN MUNA	0.4294	0.6313	Naik	357	344	Naik
7403	KABUPATEN KONAWE	0.4762	0.6674	Naik	271	266	Naik
7404	KABUPATEN KOLAKA	0.4634	0.6600	Naik	294	289	Naik
7405	KABUPATEN KONAWE SELATAN	0.4508	0.6770	Naik	314	243	Naik
7406	KABUPATEN BOMBANA	0.4331	0.5797	Naik	351	407	Turun
7407	KABUPATEN WAKATOBI	0.4397	0.7768	Naik	340	18	Naik
7408	KABUPATEN KOLAKA UTARA	0.3886	0.7306	Naik	397	100	Naik
7409	KABUPATEN BUTON UTARA	-	0.6643	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
7410	KABUPATEN KONAWE UTARA	-	0.7354	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
7471	KOTA KENDARI	0.5947	0.7376	Naik	96	83	Naik
7472	KOTA BAUBAU	0.5179	0.6201	Naik	209	359	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Tenggara seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 3 kabupaten/ kota dari 10 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat, mungkin dapat mengacu pada Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara yang mengalami kenaikan skor dan peringkat yang cukup bermakna.

**Tabel 3.30. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Gorontalo**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
7501	KABUPATEN BOALEMO	0.3716	0.6500	Naik	411	312	Naik
7502	KABUPATEN GORONTALO	0.4124	0.7110	Naik	372	148	Naik
7503	KABUPATEN POHUWATO	0.3630	0.6468	Naik	419	317	Naik
7504	KABUPATEN BONE BOLANGO	0.4423	0.6617	Naik	333	280	Naik
7505	KABUPATEN GORONTALO UTARA	-	0.6548	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-41-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
7571	KOTA GORONTALO	0.5514	0.7123	Naik	146	144	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Gorontalo seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor dan kenaikan peringkat. Tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan bermakna.

**Tabel 3.31. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Sulawesi Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
7601	KABUPATEN MAJENE	0.5093	0.7008	Naik	221	177	Naik
7602	KABUPATEN POLEWALI MAMASA	0.4463	0.6380	Naik	322	334	Turun
7603	KABUPATEN MAMASA	0.3013	0.6296	Naik	430	349	Naik
7604	KABUPATEN MAMUJU	0.3715	0.6608	Naik	412	286	Naik
7605	KABUPATEN MAMUJU UTARA	0.3778	0.6193	Naik	405	361	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Barat seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor, tetapi 1 kabupaten/ kota dari 5 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat.

**Tabel 3.32. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Maluku**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
8101	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	0.4042	0.6047	Naik	385	382	Naik
8102	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	0.5013	0.6620	Naik	233	279	Turun
8103	KABUPATEN MALUKU TENGAH	0.5209	0.6411	Naik	199	322	Turun
8104	KABUPATEN BURU	0.3688	0.6336	Naik	415	341	Naik
8105	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	0.3915	0.5298	Naik	394	426	Turun
8106	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	0.4328	0.6033	Naik	352	383	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-42-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
8107	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	0.2947	0.5008	Naik	433	434	Turun
8108	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	-	0.5866	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
8109	KABUPATEN BURU SELATAN	-	0.4065	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
8171	KOTA AMBON	0.6325	0.7330	Naik	43	92	Turun
8172	KOTA TUAL	-	0.6573	Kota baru	-	-	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Maluku seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 6 kabupaten/ kota dari 8 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir semua kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat.

**Tabel 3.33. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Maluku Utara**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
8201	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	0.4676	0.6680	Naik	283	265	Naik
8202	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	0.4255	0.5914	Naik	361	398	Turun
8203	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	0.4656	0.5023	Naik	291	433	Turun
8204	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	0.4103	0.6003	Naik	375	389	Turun
8205	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	0.4396	0.7060	Naik	341	159	Naik
8206	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	0.4399	0.6143	Naik	339	369	Turun
8207	KABUPATEN PULAU MOROTAI	-	0.5917	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
8271	KOTA TERNATE	0.5855	0.7485	Naik	109	55	Naik
8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN	0.6010	0.7451	Naik	84	65	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Maluku Utara seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 4 kabupaten/ kota dari 8 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena setengah kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-43-

**Tabel 3.34. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Papua Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
9101	KABUPATEN FAKFAK	0.5162	0.6317	Naik	211	343	Turun
9102	KABUPATEN KAIMANA	0.3849	0.6913	Naik	402	201	Naik
9103	KABUPATEN TELUK WONDAMA	0.3740	0.6338	Naik	408	339	Naik
9104	KABUPATEN TELUK BINTUNI	0.4637	0.6265	Naik	293	352	Turun
9105	KABUPATEN MANOKWARI	0.4836	0.6689	Naik	255	263	Turun
9106	KABUPATEN SORONG SELATAN	0.4289	0.5255	Naik	358	429	Turun
9107	KABUPATEN SORONG	0.5092	0.6109	Naik	222	376	Turun
9108	KABUPATEN RAJA AMPAT	0.4794	0.5470	Naik	261	417	Turun
9109	KABUPATEN TAMBRAUW	-	0.5207	Kabupaten baru	-	-	-
9110	KABUPATEN MAYBRAT	-	0.6138	Kabupaten baru	-	-	-
9171	KOTA SORONG	0.5464	0.7216	Naik	156	121	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Papua Barat seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 6 kabupaten/ kota dari 9 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bahwa hampir semua kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan hanya Kabupaten Kaimana yang mengalami kenaikan bermakna.

**Tabel 3.35. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Papua**

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
9401	KABUPATEN MERAUKE	0.5733	0.6827	Naik	122	228	Turun
9402	KABUPATEN JAYAWIJAYA	0.3148	0.5090	Naik	428	432	Turun
9403	KABUPATEN JAYAPURA	0.5388	0.6714	Naik	171	253	Turun
9404	KABUPATEN NABIRE	0.4388	0.6398	Naik	343	327	Naik
9408	KABUPATEN YAPEN WAROPEN	0.4429	0.6396	Naik	332	329	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-44-

Kode	Kabupaten/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Perubahan Skor	Peringkat 2007	Peringkat 2013	Perubahan Peringkat
9409	KABUPATEN BIAK NUMFOR	0.5073	0.6875	Naik	225	214	Naik
9410	KABUPATEN PANIAI	0.2882	0.4302	Naik	436	439	Turun
9411	KABUPATEN PUNCAK JAYA	0.2822	0.5325	Naik	438	425	Naik
9412	KABUPATEN MIMIKA	0.4841	0.6554	Naik	254	301	Turun
9413	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0.3670	0.4932	Naik	417	436	Turun
9414	KABUPATEN MAPPI	0.2997	0.5827	Naik	431	403	Naik
9415	KABUPATEN ASMAT	0.2955	0.5817	Naik	432	405	Naik
9416	KABUPATEN YAHUKIMO	0.2930	0.4822	Naik	434	437	Turun
9417	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	0.2471	0.6135	Naik	440	371	Naik
9418	KABUPATEN TOLIKARA	0.3021	0.2516	Turun	429	440	Turun
9419	KABUPATEN SARMI	0.5215	0.6691	Naik	198	260	Turun
9420	KABUPATEN KEEROM	0.5803	0.6169	Naik	115	365	Turun
9426	KABUPATEN WAROPEN	0.3636	0.6303	Naik	418	347	Naik
9427	KABUPATEN SUPIORI	0.3869	0.6119	Naik	398	374	Naik
9428	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	-	0.3948	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9429	KABUPATEN NDUGA	-	0.3311	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9430	KABUPATEN LANNY JAYA	-	0.2755	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9431	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	-	0.4652	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9432	KABUPATEN YALIMO	-	0.5286	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9433	KABUPATEN PUNCAK	-	0.3749	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9434	KABUPATEN DOGIYAI	-	0.4525	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9435	KABUPATEN INTAN JAYA	-	0.3709	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9436	KABUPATEN DEIYAI	-	0.4105	Kabupaten baru	-	-	Kabupaten baru
9471	KOTA JAYAPURA	0.6047	0.6646	Naik	77	271	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Papua ditemukan 1 kabupaten mengalami penurunan skor dan penurunan peringkat, sedangkan kabupaten/ kota lain mengalami



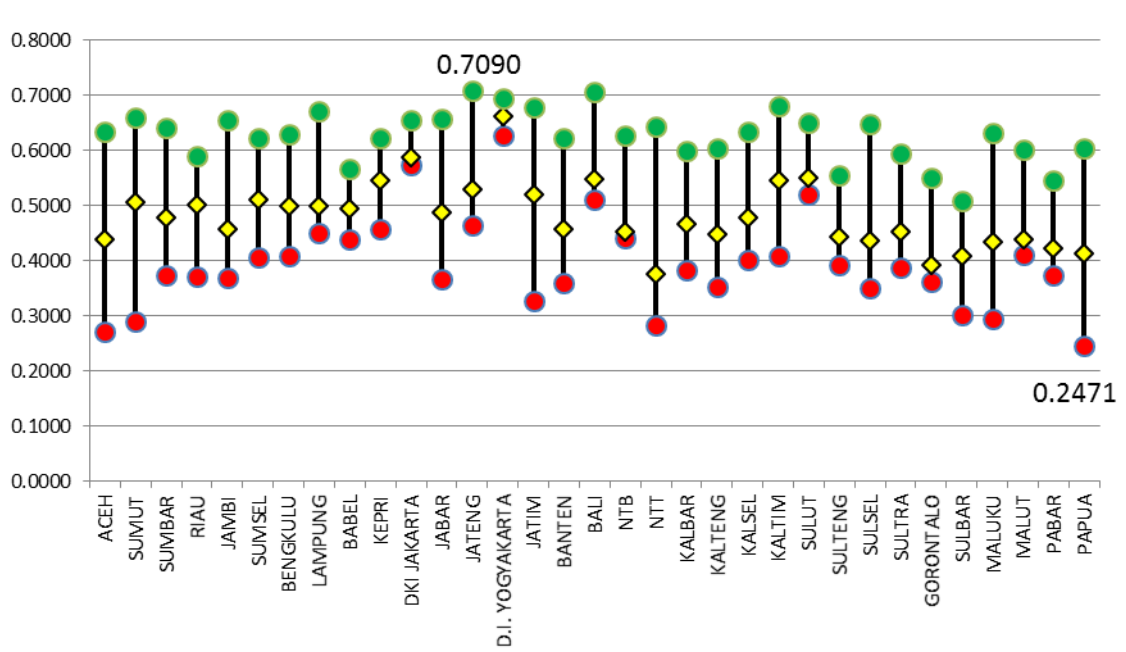
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-45-

kenaikan skor. Sebanyak 11 kabupaten/ kota dari 20 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir setengah kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan tidak ada kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan bermakna bahkan 1 kabupaten mengalami penurunan skor.

### 3.3 Kesenjangan antar Kabupaten/ Kota

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kabupaten/ kota mengalami kenaikan skor IPKM hanya 1 kabupaten di Papua yang mengalami penurunan. Jika dilihat pada perubahan peringkat menunjukkan 221 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan 2 kabupaten/ kota tidak mengalami perubahan peringkat. Perbandingan nilai minimum dan maksimum berdasarkan nilai IPKM tahun 2007 (440 kabupaten/ kota) dan IPKM tahun 2013 (497 kabupaten/ kota) dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai IPKM. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai maksimum yang diperoleh, yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,7090 dan tahun 2013 sebesar 0,8327. Namun peningkatan tersebut, tidak diikuti dengan peningkatan bermakna dari nilai terendah IPKM, yaitu dari 0,2471 hanya menjadi 0,2516. Hal ini menyebabkan kesenjangan antar wilayah makin melebar. Kesenjangan antar wilayah dapat terjadi karena banyaknya pemekaran wilayah yang belum siap untuk menangani masalah kesehatan. Lebih jelasnya kesenjangan tersebut dapat dilihat per provinsi pada gambar berikut.

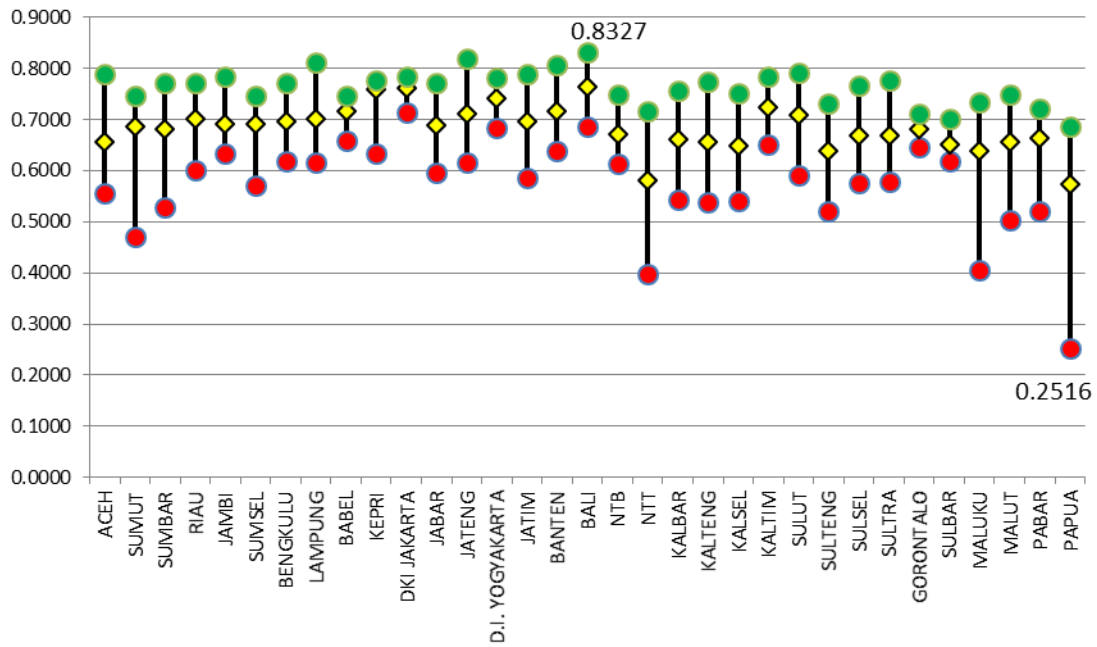


**Gambar 4.1.** Kesenjangan Wilayah dengan IPKM Tahun 2007



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-46-



**Gambar 4.2.** Kesenjangan Wilayah dengan IPKM 2013 model 2007



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-47-

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN MODEL IPKM 2013**

Model IPKM 2007 mempunyai keterbatasan indikator karena indikator kesehatan yang dianggap penting tidak tersedia di Riskesdas 2007. Hal ini disebabkan ide penyusunan IPKM muncul setelah Riskesdas 2007 selesai dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka Riskesdas 2013 diupayakan dapat berperan menyempurnakan model IPKM 2007 dalam hal mengumpulkan indikator kesehatan yang lebih lengkap. Tiga hal mendasar terkait indikator yang digunakan untuk merumuskan model IPKM tahun 2007 maupun pengembangan IPKM 2013, yaitu:

- 1) Jenis dan jumlah indikator yang dipilih
- 2) Besaran bobot antar indikator
- 3) Batasan nilai maksimum dan minimum indikator yang digunakan sebagai nilai standar dalam penghitungan indeks.

Melengkapi dan menyempurnakan indikator merupakan salah satu bagian dari pengembangan model IPKM 2013. Penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pengembangan IPKM diurai sebagai berikut.

#### **4.1. Perubahan Model IPKM**

Perubahan dengan menggunakan sumber data Riskesdas tahun 2013 dan Podes 2011 yang bertujuan untuk mengembangkan model IPKM 2007 menjadi IPKM 2013, mencakup perubahan indikator dan metodologi penghitungan indeks. Secara rinci perubahan terkait indikator meliputi:

- (i) Penambahan indikator yang dianggap penting tetapi tidak dikumpulkan pada tahun 2007.
- (ii) Pengurangan indikator yang dianggap pada saat ini kurang berperan terhadap perubahan status kesehatan.
- (iii) Beberapa indikator dipertajam dengan menambahkan kriteria yang lebih sensitif untuk menjelaskan masalah kesehatan.

Proses pengembangan IPKM 2013 dilakukan melalui serangkaian pertemuan, baik internal Balitbangkes maupun lintas program, termasuk dengan para pakar dalam dan luar negeri (Tabel 4.1).

Di dalam rangkaian kegiatan tersebut, menetapkan indikator, bobot, dan nilai minimum dan maksimum, yang digunakan dalam pengembangan IPKM 2013. Dasar pemilihan bersifat substansi kesehatan, pertimbangan prioritas program kesehatan, dan rencana pembangunan nasional. Berdasarkan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-48-

pertimbangan tersebut maka jumlah indikator kesehatan yang digunakan dalam IPKM 2013 sebanyak 30.

**Tabel 4.1. Rangkaian Pertemuan Penyusunan Model IPKM 2013**

No	Tanggal	Peserta/Pakar	Agenda
1	Januari-Februari 2014	Pertemuan Internal tim penyusun IPKM	Analisis indikator dari data Riskesdas 2013 dan Podes 2011, serta menghasilkan alternatif awal IPKM
2	10-12 Maret 2014	Pertemuan Pakar Nasional dari Universitas (UI, UNDIP, UNHAS), Adinkes, Bappenas	Pemantapan kerangka konsep, penentuan variabel, pemberian bobot
3	10-12 April 2014	Pertemuan pakar internasional: <i>Lee Kuan Yew School of Public Policy, Nasional University of Singapore; Nasional Health Foundation Thailand; ANU Australia; WHO Indonesia SEARO; Research Triangle Institute-USA</i> dan pakar nasional dari Universitas (UI, UNDIP, UNHAS), Adinkes, Bappenas, BPS	Penyampaian hasil, dan memperoleh masukan terkait kerangka konsep, penentuan variabel, pemberian bobot
4	9-12 Juni 2014	Pertemuan dengan pemegang program di Kementerian Kesehatan	Penyampaian hasil, dan memperoleh masukan terkait kerangka konsep, penentuan variabel, pemberian bobot
5	6-8 Oktober 2014	Pertemuan Regional Barat Dinas kesehatan kabupaten/ kota, provinsi: Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah	Penyampaian hasil, serta diskusi profil dan IPKM
6	10-12 Oktober 2014	Pertemuan Regional Timur Dinas kesehatan kabupaten/ kota, provinsi, Maluku, Sulawesi Tenggara, NTB	Penyampaian hasil, serta diskusi profil dan IPKM

Pengembangan model IPKM tahun 2013 bertujuan untuk memperkaya informasi indikator kesehatan sehingga dapat menghasilkan penajaman program yang harus diintervensi di kabupaten/kota. Beberapa indikator yang diubah dan ditambahkan, masing-masing dapat dilihat pada Tabel 4.2, 4.3 dan 4.4.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-49-

**Tabel 4.2. Indikator IPKM 2007 yang tidak dilibatkan pada IPKM 2013**

No	Indikator 2007	Alasan tidak dilibatkan
1	Balita kurus dan sangat kurus (BB/TB)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevelansi nasional cenderung menurun</li><li>• Menggunakan indikator status gizi lain yang lebih sensitif dalam mengukur status gizi balita (balita gizi buruk/ kurang; balita pendek/sangat pendek; balita gemuk)</li></ul>
2	Penyakit sendi	Prevalensi terlalu kecil untuk gambaran kabupaten
3	Penyakit asma	Prevalensi terlalu kecil untuk gambaran kabupaten.

**Tabel 4.3. Indikator yang ditambahkan pada IPKM 2013**

No	Indikator 2013	Alasan ditambahkan
1	Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS)	Terkait Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
2	Obesitas sentral dewasa	Permasalahan yang cenderung meningkat dan merupakan risiko beberapa penyakit tidak menular
3	Penyakit diabetes mellitus	Permasalahan PTM yang berdampak besar pada ekonomi dan kualitas hidup.
4	Perilaku Buang Air Besar (BAB)	Merupakan indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan berhubungan erat dengan penyakit infeksi.
5	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	KB merupakan indikator universal akses kesehatan reproduksi, dan MKJP merupakan alat KB paling efektif dalam mencegah kehamilan.
6	Pemeriksaan kehamilan	Untuk menggambarkan kesehatan ibu dan anak terkait Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB).
7	Rasio posyandu per desa	Untuk memberikan gambaran peran serta masyarakat
8	Aktivitas Fisik	Merupakan indikator faktor risiko PTM
9	Menggosok Gigi	Salah satu indikator faktor risiko penyakit gigi dan mulut serta kebersihan individu.

**Tabel 4.4. Indikator IPKM 2007 yang disempurnakan pada IPKM 2013**

No	Indikator 2007	Indikator 2013	Tujuan Penyempurnaan
1	Persalinan oleh tenaga kesehatan	Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Indikator menjadi lebih ideal dan terarah, serta sesuai kebijakan program.
2	Akses air	Akses air bersih	Indikator menjadi lebih ideal dan terarah



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-50-

No	Indikator 2007	Indikator 2013	Tujuan Penyempurnaan
3	Perilaku menggunakan tembakau	Perilaku merokok	Mendapatkan gambaran permasalahan rokok hisap saja
4	Rasio bidan per desa	Proporsi desa dengan bidan cukup yaitu 1 bidan per 1.000 penduduk	Definisi sesuai dengan target Indonesia Sehat 2010
5	Rasio dokter per puskesmas	Proporsi kecamatan dengan dokter cukup yaitu 1 dokter per 2.500 penduduk	Definisi sesuai dengan target Indonesia Sehat 2010
6	Kunjungan Neonatal (KN) 1	Kunjungan Neonatal pada 6 jam-48 jam pertama setelah lahir	Definisi sesuai yang digunakan program kesehatan anak

Persamaan dan perbedaan indikator yang digunakan IPKM 2007 dan pengembangan IPKM 2013, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Indikator dalam IPKM 2007 dan Model Pengembangan IPKM 2013**

No.	Indikator IPKM 2007	Indikator Pengembangan IPKM 2013
1	Balita gizi buruk dan kurang	Balita gizi buruk dan kurang
2	Balita sangat pendek dan pendek	Balita sangat pendek dan pendek
3	Balita sangat kurus dan kurus	
4	Akses air bersih	Akses air bersih
5	Akses sanitasi	Akses sanitasi
6	Penimbangan balita	Penimbangan balita
7	Kunjungan neonatal	Kunjungan neonatal
8	Imunisasi lengkap	Imunisasi lengkap
9	Rasio jumlah dokter dengan jumlah puskesmas	Proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter
10	Rasio jumlah bidan dengan jumlah desa	Proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan
11	Persalinan oleh tenaga kesehatan	Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
12	Balita gemuk	Balita gemuk
13	Diare	Diare balita
14	Hipertensi	Hipertensi
15	Pneumonia	Pneumonia



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-51-

No.	Indikator IPKM 2007	Indikator Pengembangan IPKM 2013
16	Perilaku cuci tangan	Cuci tangan dengan benar
17	Gangguan mental	Gangguan mental
18	Konsumsi tembakau	Merokok
19	Sakit gigi dan mulut	Sakit gigi dan mulut
20	Asma	
21	Disabilitas	
22	Cedera	Cedera
23	Sakit sendi	
24	ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)	ISPA balita
25		Penggunaan alat kontrasepsi (MKJP)
26		Pemeriksaan Kehamilan (K4 :1-1-2)
27		Kurang Energi Kronik (KEK) pada Wanita Usia Subur
28		Proporsi desa dengan kecukupan jumlah posyandu
29		Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan
30		Buang air besar di jamban
31		Aktivitas fisik cukup
32		Menggosok gigi dengan benar
33		Diabetes Mellitus
34		Obesitas sentral

Pengembangan model IPKM 2013 juga mencakup perubahan metode penghitungan indeks. Metode ini mengelompokkan 30 indikator terpilih menjadi 7 (tujuh) kelompok indikator kesehatan yang kemudian dihitung nilai sub indeks masing-masing. Hasil nilai sub indeks ini dapat memberikan gambaran baik buruknya kondisi kesehatan di tiap kabupaten/kota menurut masing-masing kelompok. Nilai indeks mendekati satu menunjukkan kondisi yang baik.

**Tabel 4.6. Kelompok Indikator IPKM 2013**

No	Kolompok Indikator	Jumlah Indikator
1	Kesehatan Balita	6
2	Kesehatan Reproduksi	3
3	Pelayanan Kesehatan	5
4	Perilaku Kesehatan	5
5	Penyakit Tidak Menular	6
6	Penyakit Menular	3
7	Kesehatan Lingkungan	2
	Total	30



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-52-

Tahap berikutnya adalah penentuan bobot untuk masing-masing indikator berdasarkan penilaian dari 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Keterpaparan (besar dan luas masalah yang ada di masyarakat)
2. Dampak (dampak terhadap status kesehatan)
3. Urgensi (perlu kecepatan untuk dilakukan penanganan)
4. Sulit diatasi (masalah kesehatan yang tidak mudah diselesaikan).

Langkah pembobotan tiap indikator diawali dengan pemberian bobot satu. Selanjutnya, tiap indikator mendapatkan tambahan bobot sesuai dengan penilaian empat unsur. Dengan demikian, jika empat unsur terpenuhi maka bobot indikator tersebut menjadi lima (bobot tertinggi). Contoh pembobotan indikator IPKM 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Contoh Pembobotan Indikator IPKM 2013**

Indikator	Skor awal	Unsur				Bobot
		Keterpaparan	Dampak	Urgensi	Sulit Diatasi	
Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	1	1	1	1	1	5
Proporsi perilaku cuci tangan	1	0	1	1	0	3
Prevalensi gangguan mental	1	0	1	1	1	4

Secara rinci nilai bobot untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8. Indikator dan Bobot IPKM 2013**

No	Indikator	Bobot	Kategori Bobot
	<b>1. Kesehatan Balita</b>		
1	Balita gizi buruk dan kurang	5	Mutlak
2	Balita sangat pendek dan pendek	5	Mutlak
3	Balita gemuk	4	Penting
4	Penimbangan balita	4	Penting
5	Kunjungan neonatal	4	Penting
6	Imunisasi lengkap	4	Penting
	<b>2. Kesehatan Reproduksi</b>		
7	Penggunaan alat kontrasepsi (MKJP)	5	Mutlak
8	Pemeriksaan Kehamilan (K4 :1-1-2)	5	Mutlak
9	Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS	5	Mutlak
	<b>3. Pelayanan Kesehatan</b>		
10	Persalinan oleh nakes di Faskes	4	Penting



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-53-

No	Indikator	Bobot	Kategori Bobot
11	Proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk	5	Mutlak
12	Proporsi desa dengan kecukupan jumlah Posyandu per desa	4	Penting
13	Proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk	3	Perlu
14	Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan	4	Penting
	<b>4. Perilaku Kesehatan</b>		
15	Merokok	4	Penting
16	Cuci tangan dengan benar	3	Perlu
17	Buang air besar di jamban	3	Perlu
18	Aktivitas fisik cukup	3	Perlu
19	Menggosok gigi dengan benar	3	Perlu
	<b>5. Penyakit Tidak Menular</b>		
20	Hipertensi	5	Mutlak
21	Cedera	5	Mutlak
22	Diabetes Mellitus	5	Mutlak
23	Gangguan Mental	4	Penting
24	Obesitas Sentral	4	Penting
25	Sakit Gigi dan Mulut	4	Penting
	<b>6. Penyakit Menular</b>		
26	Pneumonia	5	Mutlak
27	Diare balita	4	Penting
28	ISPA balita	4	Penting
	<b>7. Kesehatan Lingkungan</b>		
29	Akses Sanitasi	3	Perlu
30	Akses Air Bersih	3	Perlu

#### 4.1.1 Definisi Operasional Indikator IPKM 2013

##### a. Kelompok Indikator Kesehatan Balita

###### 1. Balita gizi buruk dan kurang

Perbandingan berat badan dan umur. Gizi Buruk dan Kurang jika mempunyai nilai *Z score* kurang dari -2 SD (WHO, 2005).

###### 2. Balita sangat pendek dan pendek

Perbandingan tinggi badan dan umur. Balita Sangat Pendek dan Pendek jika mempunyai nilai *Z score* kurang dari -2 SD (WHO, 2005).

###### 3. Balita gemuk

Perbandingan berat badan dan tinggi badan. Gemuk jika mempunyai nilai *Z score* di atas 2 SD (WHO, 2005).

###### 4. Penimbangan balita

Balita yang pernah ditimbang dalam 6 bulan terakhir (Depkes, 2008 & Kemenkes, 2010).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-54-

5. Kunjungan neonatal (KN) 1

Balita yang pernah mendapat pelayanan kesehatan pada 6 jam – 48 jam pertama setelah lahir (Depkes, 2008; Kemenkes, 2010; & Kemenkes, 2010).

6. Imunisasi lengkap

Jenis dan frekuensi imunisasi yang telah diperoleh anak umur 12-59 bulan. Lengkap jika anak tersebut telah diimunisasi 1 kali BCG dan minimal 3 kali DPT dan minimal 3 kali Polio dan 1 kali Campak (Depkes, 2005; Kemenkes, 2010 & Kemenkes, 2010).

**b. Kelompok Indikator Kesehatan Reproduksi**

7. Penggunaan alat kontrasepsi (MKJP)

Penggunaan alat kontrasepsi dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu sterilisasi pria, sterilisasi wanita, IUD/AKDR/Spiral, diafragma, susuk/implant pada pasangan usia subur umur 15-49 tahun (Kemenkes, 2013).

8. Pemeriksaan Kehamilan (K4 : 1-1-2)

Frekuensi pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan minimal dilakukan 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga (Depkes, 2008c; Kemenkes, 2010b; & Kemenkes, 2010e).

9. Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur

Kurang Energi Kronis (KEK) pada wanita usia subur umur 15-49 tahun (hamil dan tidak hamil), jika lingkar lengan atas yang diukur pada saat penelitian di bawah 23,5 cm (Depkes, 1994 & Depkes, 1996).

**c. Kelompok Indikator Pelayanan Kesehatan**

10. Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

Proses persalinan dibantu tenaga kesehatan dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan dengan unit analisis balita. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter kandungan, dokter umum, dan bidan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah RS pemerintah, RS swasta, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Nakes, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes/ Poskesdes (Depkes, 2008).

11. Proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk

Proporsi kecamatan dalam satu kabupaten yang memiliki kecukupan rasio dokter per jumlah penduduk kecamatan. Rasio dokter cukup jika dalam 1 kecamatan memiliki minimal 1 dokter per 2.500 penduduk (Kemenkes, 2010).





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-55-

12. Proporsi desa dengan kecukupan jumlah posyandu per desa

Proporsi desa dalam satu kabupaten yang memiliki kecukupan rasio posyandu per desa. Rasio posyandu cukup jika dalam 1 desa memiliki jumlah posyandu minimal 4 posyandu (Kemenkes, 2010).

13. Proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk

Proporsi desa dalam satu kabupaten yang memiliki kecukupan rasio jumlah bidan per jumlah penduduk desa. Rasio jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan per 1.000 penduduk (Kemenkes, 2010).

14. Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Penduduk yang memiliki minimal satu jenis jaminan pelayanan kesehatan. Jenis jaminan yang dimaksud adalah Askes/JPK PNS/Veteran/Pensiun, JPK Jamsostek, Asuransi Kesehatan Swasta, Tunjangan Kesehatan Perusahaan, Jamkesmas, Jamkesda (Kemenkes, 2010).

**d. Kelompok indikator perilakukesehatan**

15. Merokok

Kebiasaan merokok pada penduduk umur 10 tahun ke atas selama 1 bulan terakhir. Kebiasaan merokok adalah apabila merokok dilakukan setiap hari atau kadang-kadang (WHO, 2012).

16. Kebiasaan cuci tangan

Kebiasaan cuci tangan benar pada penduduk umur 10 tahun ke atas, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun pada saat sebelum menyiapkan makanan dan setiap kali tangan kotor (memegang uang, binatang, berkebun) dan setelah buang air besar dan setelah menceboki bayi dan setelah menggunakan pestisida/insektisida dan sebelum menyusui bayi (Kementerian Kesehatan, 2011).

17. Buang Air Besar (BAB) di jamban

Kebiasaan buang air besar pada penduduk umur 10 tahun ke atas. BAB benar jika mempunyai kebiasaan buang air besar di jamban (Depkes, 2009).

18. Aktivitas fisik

Kebiasaan aktifitas fisik pada penduduk umur 10 tahun ke atas. Aktivitas fisik cukup adalah individu yang melakukan aktivitas fisik berat atau sedang atau keduanya dalam seminggu berdasarkan kriteria WHO GPAQ (*Global Physical Activity Questionnaire*). Aktivitas fisik berat adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus minimal sepuluh menit selama minimal tiga hari dalam satu minggu dengan total waktu beraktivitas



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-56-

$\geq 1500$  *MET minute*. *MET minute* aktivitas fisik berat adalah lamanya waktu (menit) melakukan aktivitas dalam satu minggu dikalikan bobot sebesar 8 kalori. Aktivitas fisik sedang apabila melakukan aktivitas fisik sedang (menyapu, mengepel, dll) minimal lima hari dengan total lamanya beraktivitas 150 menit dalam satu minggu (WHO, 2012).

19. Menggosok gigi

Kebiasaan menggosok gigi setiap hari pada penduduk umur 10 tahun ke atas. Kebiasaan menggosok gigi dengan benar jika dilakukan sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam (Depkes, 2002).

**e. Kelompok Indikator Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risikonya**

20. Hipertensi

Penduduk umur 15 tahun yang diukur sistol dan diastolnya pada saat penelitian. Hipertensi adalah jika tekanan darah sistol lebih besar sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastol lebih besar sama dengan 90 mmHg (National Institute of Health, 2004).

21. Cedera

Penduduk semua umur yang pernah mengalami cedera dalam 12 bulan terakhir sehingga kegiatan sehari-hari terganggu (WHO, 1992).

22. Diabetes Mellitus

Penduduk umur 15 tahun ke atas yang pernah didiagnosis menderita kencing manis oleh dokter (ADA, 2011).

23. Gangguan Mental (Kesehatan jiwa)

Penduduk umur 15 tahun ke atas yang pernah mengalami gangguan kesehatan jiwa. Gangguan kesehatan jiwa ditetapkan menggunakan metode SRQ-20. Kesehatan jiwa terganggu jika mempunyai skor 6 ke atas (Lewis, G. H., Thomas, H. V., Cannon, M. & Jones, P. B., 2001).

24. Obesitas sentral

Penduduk umur 15 tahun ke atas (kecuali ibu hamil) yang diukur lingkar perut pada saat penelitian. Batasan obesitas sentral yang digunakan adalah lingkar perut pada perempuan 80 cm ke atas dan pada laki-laki 90 cm ke atas (WHO, 2000).

25. Kesehatan gigi dan mulut

Penduduk semua umur yang mempunyai masalah dengan gigi dan/ atau mulut dalam 12 bulan terakhir (Kemenkes, 2011).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-57-

#### **f. Kelompok Indikator Penyakit Menular**

##### 26. Pneumonia

Penduduk semua umur yang didiagnosis pneumonia atau mengalami gejala pneumonia dalam 1 bulan terakhir (Kemenkes, 2012).

##### 27. Diare Balita

Balita yang didiagnosis diare atau mengalami gejala diare oleh tenaga kesehatan dalam 1 bulan terakhir (Kemenkes, 2011).

##### 28. Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) Balita

Balita yang pernah didiagnosis menderita sakit ISPA oleh tenaga kesehatan atau mengalami gejala sakit ISPA dalam 1 bulan terakhir (Kemenkes, 2012).

#### **g. Kelompok Indikator Kesehatan Lingkungan**

##### 29. Akses Sanitasi

Akses sanitasi diukur berdasarkan kepemilikan dan jenis fasilitas buang air besar. Akses sanitasi baik apabila rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri dan jenis kloset leher angsa (WHO, UNICEF, 2013).

##### 30. Akses Air Bersih

Penggunaan air bersih perkapita dalam rumah tangga. Akses air bersih baik jika rumah tangga minimal menggunakan 20 liter per orang per hari dan berasal dari air ledeng/PDAM atau air ledeng eceran/membeli atau sumur bor/pompa atau sumur gali terlindung atau mata air terlindung (WHO, 2014).

#### **4.1.2 Langkah-langkah Formulasi IPKM 2013**

Cara menghitung model IPKM 2013 berbeda dengan IPKM 2007, hal ini bertujuan agar peran dari masing-masing kelompok indikator terhadap pembangunan kesehatan masyarakat dapat lebih terinci. Urutan kerja untuk seluruh alternatif model adalah:

1. Pada level kabupaten/kota dilakukan analisis indikator untuk mendapatkan angka prevalensi/proporsi/cakupan, untuk selanjutnya disebut nilai indikator.
2. Nilai indikator yang mempunyai arti negatif dilakukan penyetaraan sehingga indikator mempunyai arti yang positif. Sebagai contoh pada indikator prevalensi dilakukan penyetaraan dengan menggunakan rumus (100-angka prevalensi). Dengan demikian indikator prevalensi tersebut



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-58-

mempunyai arti yang setara dengan cakupan, bahwa semakin tinggi nilai indikator prevalensi yang sudah disetarakan maka semakin baik.

3. Masing-masing indikator ditentukan nilai bobotnya (lihat Tabel 4.8).
4. Indikator dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok indikator berdasarkan substansi.
5. Menetapkan nilai standar minimum dan maksimum berdasarkan nilai indikator dan nilai ideal (lihat tabel 4.9).
6. Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan rumus:

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \frac{(\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum})}{(\text{nilai standar maksimum} - \text{nilai standar minimum})}$$

7. Menghitung proporsi bobot tiap indikator dalam satu kelompok, dengan cara:

$$\text{Proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot kelompok indikator}}$$

8. Menghitung indeks masing-masing kelompok indikator dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Indeks kelompok indikator} = (\text{Nilai Indeks Indikator}_{(1)} * \text{Proporsi Bobot}_{(1)}) + (\text{Nilai Indeks Indikator}_{(2)} * \text{Proporsi Bobot}_{(2)}) + \dots + (\text{Nilai Indeks Indikator}_{(7)} * \text{Proporsi Bobot}_{(7)})$$

9. Ulangi langkah 6 sampai dengan 8 untuk tujuh kelompok indikator
10. Setelah diperoleh tujuh nilai indeks kelompok indikator, maka dilanjutkan dengan menghitung Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)

$$\text{IPKM} = \frac{\text{Indeks Kelompok Indikator}_{(1)} + \text{Indeks Kelompok Indikator}_{(2)} + \dots + \text{Indeks Kelompok Indikator}_{(7)}}{7}$$

11. Nilai IPKM yang diperoleh, diurutkan dari terendah sampai tertinggi untuk mendapatkan peringkat kabupaten/kota.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-59-

**Tabel 4.9. Nilai Standar Minimum - Maksimum Indikator IPKM 2013**

No	Indikator	Prevalensi (data kabupaten terburuk)	Prevelensi Penyetaraan (100- a)	Standar	
				Mini- mum	Maksi- mum
		a	b	c	d
	<b>Kesehatan Balita</b>				
1	Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	47,63	52,37	52,37	100
2	Prevalensi balita sangat pendek dan pendek	70,43	29,57	29,57	100
3	Cakupan penimbangan balita	-	-	0	100
4	Cakupan kunjungan neonatal 1	-	-	0	100
5	Cakupan imunisasi lengkap	-	-	0	100
6	Prevalensi Balita gemuk	80,39	19,61	19,61	100
	<b>Kesehatan Reproduksi</b>				
7	Proporsi KB (MKJP)	-	-	0	100
8	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (1-1-2)	-	-	0	100
9	Prevalensi KEK (Lila <23,5)	74,67	25,33	25,33	100
	<b>Pelayanan Kesehatan</b>				
10	Proporsi Persalinan oleh nakes di Faskes	-	-	0	100
11	Proporsi kecamatan dengan kecukupan dokter	-	-	0	100
12	Proporsi desa dengan kecukupan jumlah Posyandu	-	-	0	100
13	Proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan	-	-	0	100
14	Proporsi Kepemilikan Jaminan Kesehatan	-	-	0,22	100
	<b>Perilaku</b>				
15	Proporsi merokok	44,08	55,92	55,92	100
16	Proporsi perilaku cuci tangan	-	-	1,26	100
17	Proporsi Perilaku BAB	-	-	6,74	100
18	Proporsi Aktivitas Fisik	-	-	5,51	100
19	Proporsi Gosok Gigi	-	-	0	100
	<b>Penyakit Tidak Menular</b>				
20	Prevalensi Hipertensi	41,57	58,43	58,43	100
21	Prevalensi cedera	25,23	74,77	74,77	100
22	Prevalensi Diabetes Mellitus	4,83	95,17	95,17	100
23	Prevalensi gangguan mental	48,43	51,57	51,57	100
24	Proporsi obesitas sentral	60,59	39,41	39,41	100
25	Prevalensi sakit gigi dan mulut	51,52	48,48	48,48	100
	<b>Penyakit Menular</b>				
26	Prevalensi Pneumonia	19,64	80,36	80,36	100
27	Prevalensi Diare balita	64,57	35,43	35,43	100
28	Prevalensi ISPA balita	83,81	16,19	16,19	100
	<b>Kesehatan Lingkungan</b>				
29	Proporsi Akses sanitasi	-	-	0	100
30	Proporsi Kecukupan Air Bersih	-	-	1,99	100



**Catatan:**

Khusus pada indikator cakupan dan proporsi (kecuali proporsi merokok) penentuan angka minimum tidak dilakukan penyetaraan sehingga pada tabel diatas tidak mempunyai nilai (-). Angka minimum diperoleh langsung dari data kabupaten/kota. Contoh: pada cakupan penimbangan balita nilai terkecil kabupaten/kota adalah 0, pada proporsi perilaku cuci tangan nilai terkecil kabupaten/kota adalah 1,26.

**Simulasi Penghitungan Indeks**

Ilustrasi perhitungan indeks kelompok kesehatan lingkungan dapat dilihat pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10. Ilustrasi Perhitungan IPKM Kabupaten “X”**

No	Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan Positif	Standar		(d)-(e)	(f)-(e)	indeks indikator (g)/(h)	Bobot	Proporsi Bobot	(i)*(k)	Indeks Kelompok Indikator	Skor IPKM
				Mini-mum	Maksi-mum								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
<b>1. Kesehatan Balita</b>												0.6746	0.6078
1	Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	14.93	85.07	52.37	100	32.70	47.63	0.69	5	0.19	0.1320		
2	Prevalensi balita sangat pendek dan pendek	34.04	65.96	29.57	100	36.39	70.43	0.52	5	0.19	0.0994		
3	Cakupan penimbangan balita	65.96	65.96	0	100	65.96	100	0.66	4	0.15	0.1015		
4	Cakupan kunjungan neonatal 1	95.13	95.13	0	100	95.13	100	0.95	4	0.15	0.1464		
5	Cakupan imunisasi lengkap	48.08	48.08	0	100	48.08	100	0.48	4	0.15	0.0740		
6	Prevalensi Balita gemuk	16.95	83.05	19.61	100	63.44	80.39	0.79	4	0.15	0.1214		
<b>2. Kesehatan Reproduksi</b>												0.5596	
7	Proporsi KB (MKJP)	19.53	19.53	0	100	19.53	100	0.20	5	0.33	0.0651		
8	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (1-1-2)	63.81	63.81	0	100	63.81	100	0.64	5	0.33	0.2127		
9	Prevalensi KEK (Lila <23.5)	11.54	88.46	25.33	100	63.13	74.67	0.85	5	0.33	0.2818		
<b>3. Pelayanan Kesehatan</b>												0.6258	
10	Proporsi Persalinan oleh nakes di Faskes	97.60	97.60	0	100	97.60	100	0.98	4	0.20	0.1952		
11	Proporsi kecamatan dengan kecukupan dokter	20.00	20.00	0	100	20.00	100	0.20	5	0.25	0.0500		
12	Proporsi desa dengan kecukupan jumlah Posyandu	82.35	82.35	0	100	82.35	100	0.82	4	0.20	0.1647		
13	Proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan	13.73	13.73	0	100	13.73	100	0.14	3	0.15	0.0206		
14	Proporsi Kepemilikan Jaminan Kesehatan	97.65	97.65	0.22	100	97.43	99.78	0.98	4	0.20	0.1953		
<b>4. Perilaku</b>												0.4231	
15	Proporsi merokok	27.22	72.78	55.92	100	16.86	44.08	0.38	4	0.25	0.0956		
16	Proporsi perilaku cuci tangan	70.23	70.23	1.26	100	68.97	98.74	0.70	3	0.19	0.1310		
17	Proporsi Perilaku BAB	88.10	88.10	6.74	100	81.36	93.26	0.87	3	0.19	0.1636		
18	Proporsi Aktivitas Fisik	20.79	20.79	5.51	100	15.28	94.49	0.16	3	0.19	0.0303		
19	Proporsi Gosok Gigi	1.41	1.41	0	100	1.41	100	0.01	3	0.19	0.0026		
<b>5. Penyakit Tidak Menular</b>												0.6251	
20	Prevalensi Hipertensi	15.69	84.31	58.43	100	25.88	41.57	0.62	5	0.19	0.1153		
21	Prevalensi cedera	6.93	93.07	74.77	100	18.30	25.23	0.73	5	0.19	0.1343		
22	Prevalensi Diabetes Mellitus	1.90	98.10	95.17	100	2.93	4.83	0.61	5	0.19	0.1123		
23	Prevalensi gangguan mental	6.49	93.51	51.57	100	41.94	48.43	0.87	4	0.15	0.1283		
24	Proporsi Lingkar Perut	32.19	67.81	39.41	100	28.40	60.59	0.47	4	0.15	0.0694		
25	Prevalensi sakit gigi dan mulut	28.78	71.22	48.48	100	22.74	51.52	0.44	4	0.15	0.0654		
<b>6. Penyakit Menular</b>												0.7789	
26	Prevalensi Pneumonia	1.93	98.07	80.36	100	17.71	19.64	0.90	5	0.38	0.3468		
27	Prevalensi Diare balita	12.35	87.65	35.43	100	52.22	64.57	0.81	4	0.31	0.2488		
28	Prevalensi ISPA balita	33.91	66.09	16.19	100	49.90	83.81	0.60	4	0.31	0.1832		
<b>7. Kesehatan Lingkungan</b>												0.5677	
29	Proporsi Akses sanitasi	69.34	69.34	0	100	69.34	100	0.69	3	0.50	0.3467		
30	Proporsi Kecukupan Air Bersih	45.31	45.31	1.99	100	43.32	98.01	0.44	3	0.50	0.2210		





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-61-

Pada Tabel 4.10, menjelaskan cara menghitung indeks untuk masing-masing kelompok indikator dan IPKM. Kolom penyetaraan positif adalah indikator yang bersifat negatif dilakukan penghitungan ke nilai positif dengan cara mengurangi nilai indikator dari nilai 100. Indikator yang sudah bersifat positif menggunakan nilai indikator. Nilai minimum dan maksimum ditentukan dan digunakan untuk setiap kali menghitung IPKM. Contoh hasil hitung nilai IPKM beberapa kabupaten/ kota dapat dilihat pada Tabel 4.11. Jika dicermati nilai indeks kelompok tertinggi di Kabupaten Jembrana adalah program Penyakit Menular sebesar 0,7780. Sedangkan nilai indeks kelompok terendah adalah pada kelompok indikator perilaku yaitu sebesar 0,4275. Dengan kata lain, untuk memperbaiki derajat kesehatan di Kabupaten Jembrana, maka perbaikan kesehatan dititikberatkan pada perbaikan indikator perilaku, seperti merokok, cuci tangan, BAB, dan lain-lain.

**Tabel 4.11. Skor Indeks Kelompok Indikator dan IPKM 2013 Kabupaten/ kota di Provinsi Bali**

Kabupaten/ kota	Kelompok Indikator							IPKM
	Kespro	Yankes	Perilaku	PTM	PM	Kesling	Kes. Balita	
Jembrana	0.5540	0.6258	0.4275	0.6378	0.7780	0.5732	0.6608	0.6081
Tabanan	0.6253	0.6738	0.4639	0.6217	0.8109	0.8356	0.7470	0.6826
Badung	0.6376	0.6431	0.4434	0.5945	0.7872	0.7228	0.7535	0.6546
Gianyar	0.6977	0.7011	0.5578	0.8215	0.8768	0.8236	0.6677	0.7352
Klungkung	0.6097	0.6187	0.4214	0.5805	0.7578	0.5809	0.7731	0.6203
Bangli	0.5865	0.5523	0.4387	0.5544	0.6361	0.5757	0.6996	0.5776
Karangasem	0.5090	0.5725	0.4243	0.6733	0.6308	0.5777	0.6885	0.5823
Buleleng	0.5545	0.5366	0.4195	0.6442	0.7745	0.7868	0.6176	0.6191
Kota Denpasar	0.5517	0.8089	0.4636	0.7154	0.8466	0.7707	0.7377	0.6992

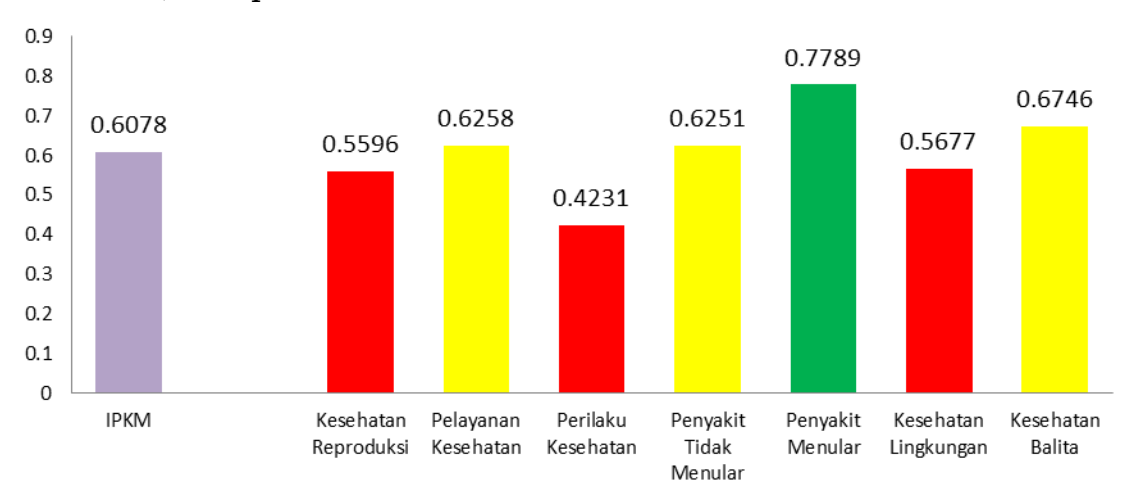
Sebagai contoh penggunaan model pengembangan IPKM 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pada gambar tersebut sebuah kabupaten mencapai skor IPKM sebesar 0,6078 dan capaian kelompok indikator penyakit menular sudah cukup baik. Kesimpulan dari hasil ini adalah berdasarkan indeks kelompok indikator maka kabupaten tersebut harus memperhatikan capaian indikator pada kelompok indikator perilaku, kesehatan reproduksi, dan kesehatan lingkungan agar nilai IPKM nya dapat meningkat. Jika melihat masing-masing indikator pada Tabel 4.10 maka perhatian utama pada



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-62-

kelompok perilaku kesehatan, khususnya indikator gosok gigi dengan benar, aktivitas fisik, dan perilaku merokok.



**Gambar 4.1. Indeks Kelompok Indikator**

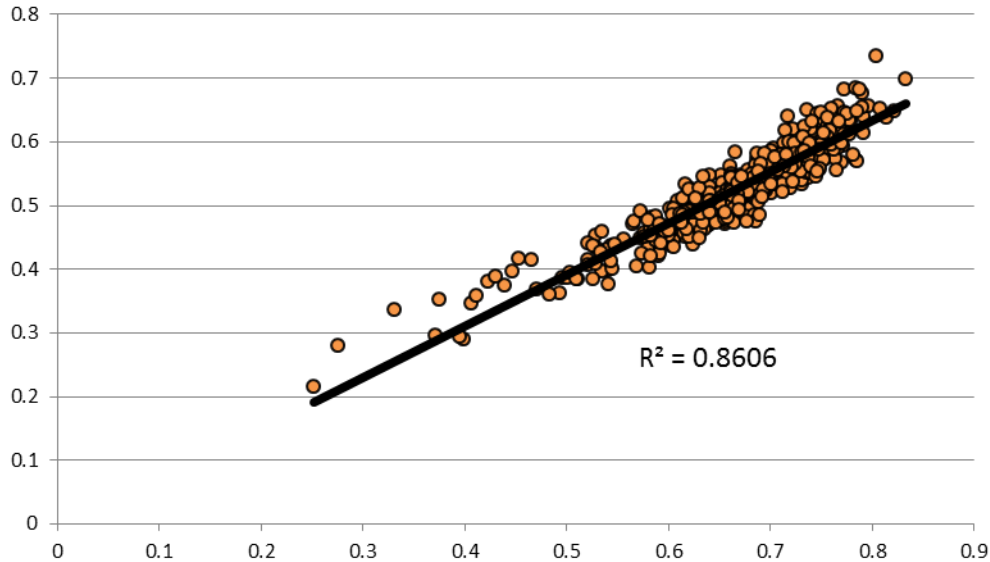
#### 4.2. Perbandingan Model IPKM

Pengembangan model IPKM dalam hal kuantitas dan kualitas indikator disertai perubahan rumus penghitungan, dapat mulai digunakan untuk tahun 2013. Jika menggunakan model pengembangan ini, perubahan peringkat kabupaten/kota tahun 2007-2013 yang terjadi, bukan disebabkan oleh perubahan model tersebut. Hasil analisis data tahun 2013 dengan menggunakan model tahun 2007 dan model tahun 2013 mempunyai nilai korelasi secara statistik sebesar 0,93 dan model mempunyai kemampuan menjelaskan sebesar 0,86 atau 86%. Arti nilai tersebut adalah jika mendekati nilai 1 maka kedua model mempunyai makna yang hampir sama. Oleh karena itu, jika menggunakan model yang baru menunjukkan kondisi yang sama dengan model lama tetapi dapat memberi informasi indikator yang lebih banyak. Contoh untuk kabupaten yang IPKM 2013 dengan model 2007 skornya naik maka menggunakan model pengembangan IPKM 2013 skornya juga naik, walau ada perbedaan peringkatnya. Korelasi skor atau peringkat tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-63-



**Gambar 4.2 Korelasi IPKM 2013 Model Lama dan Model Baru**

Keunggulan kabupaten/kota jika menggunakan model yang baru maka dapat memantau indikator yang lebih lengkap yaitu sebanyak 30 indikator dan dapat lebih fokus untuk memperbaiki masalah kesehatan yang terjadi di wilayahnya dengan cara melihat nilai indeks pada 7 kelompok indikator. Berdasarkan keunggulan model pengembangan ini maka model ini akan digunakan untuk penghitungan IPKM selanjutnya.

Pada Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 menunjukkan kabupaten/kota yang menduduki peringkat 10 teratas dan terbawah berdasarkan pengembangan IPKM 2013. Pada tahun 2007, jumlah kabupaten/kota sebanyak 440, sedangkan pada tahun 2013 telah terjadi pemekaran wilayah, sehingga jumlah kabupaten/kota bertambah mencapai 497. Oleh karena itu saat dilakukan perbandingan peringkat kabupaten/kota untuk IPKM 2013 dan 2007 terdapat beberapa kabupaten/kota yang nilai IPKM 2007 kosong. Artinya, kabupaten/kota tersebut belum ada secara administratif pada tahun 2007, seperti Kabupaten Deiyai.

**Tabel 4.12. Peringkat Kabupaten/Kota Teratas berdasarkan Pengembangan IPKM 2013**

KODE	KABUPATEN/ KOTA	IPKM 2007		IPKM 2013 MODEL 2007		PENGEMBANGAN IPKM 2013	
		SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT
5104	KABUPATEN GIANYAR	0.7065	2	0.8032	5	0.7352	1
5171	KOTA DENPASAR	0.6796	9	0.8327	1	0.6992	2
3571	KOTA KEDIRI	0.6373	35	0.7830	15	0.6848	3
5102	KABUPATEN TABANAN	0.6638	13	0.7866	11	0.6826	4



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-64-

KODE	KABUPATEN/ KOTA	IPKM 2007		IPKM 2013 MODEL 2007		PENGEMBANGAN IPKM 2013	
		SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT
1471	KOTA PEKAN BARU	0.5898	105	0.7721	22	0.6823	5
3577	KOTA MADIUN	0.6790	10	0.7900	9	0.6769	6
3373	KOTA SALATIGA	0.7045	3	0.7957	6	0.6573	7
1375	KOTA BUKIT TINGGI	0.6407	33	0.7661	30	0.6572	8
5103	KABUPATEN BADUNG	0.6722	12	0.7897	10	0.6546	9
3371	KOTA MAGELANG	0.7090	1	0.7597	37	0.6524	10

**Tabel 4.13. Peringkat Kabupaten/Kota Terbawah berdasarkan Pengembangan IPKM 2013**

KODE	KABUPATEN/ KOTA	IPKM 2007		IPKM 2013 MODEL 2007		PENGEMBANGAN IPKM 2013	
		SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT
9416	KABUPATEN YAHUKIMO	0.2930	434	0.4822	481	0.3621	488
9436	KABUPATEN DEIYAI	-	-	0.4105	489	0.3597	489
9433	KABUPATEN PUNCAK	-	-	0.3749	493	0.3534	490
8109	KABUPATEN BURU SELATAN	-	-	0.4065	490	0.3473	491
9429	KABUPATEN NDUGA	-	-	0.3311	495	0.3363	492
9435	KABUPATEN INTAN JAYA	-	-	0.3709	494	0.2959	493
9428	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	-	-	0.3948	492	0.2939	494
5319	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	-	-	0.399	491	0.2901	495
9430	KABUPATEN LANNY JAYA	-	-	0.2755	496	0.2801	496
9418	KABUPATEN TOLIKARA	0.3021	429	0.2516	497	0.2169	497

Perbandingan IPKM 2007 dengan hasil dari pengembangan model IPKM 2013 dapat dilihat lebih lengkap pada lampiran. Tabel-tabel berikut hanya membandingkan peringkat pada 440 kabupaten/kota sesuai dengan jumlah kabupaten/kota pada saat tahun 2007. Peringkat tersebut juga dapat dibandingkan dengan peringkat IPKM tahun 2013 yang menggunakan model IPKM 2007. Jika ada perbedaan status naik/ turun peringkat antara model



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-65-

2007 dan model pengembangan 2013, hal yang harus menjadi perhatian adalah indikator-indikator perubahan yang ada di model pengembangan. Secara umum, skor yang diperoleh seluruh kabupaten/kota dengan menggunakan model pengembangan 2013 mengalami peningkatan, kecuali Kabupaten Tolikara mengalami penurunan skor sama dengan yang ditemukan pada IPKM 2013 model 2007.

**Tabel 4.14. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Aceh**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
1101	KABUPATEN SIMEULUE	344	219	246	Naik	Naik
1102	KABUPATEN ACEH SINGKIL	321	302	372	Naik	Turun
1103	KABUPATEN ACEH SELATAN	393	416	408	Turun	Turun
1104	KABUPATEN ACEH TENGGARA	391	180	201	Naik	Naik
1105	KABUPATEN ACEH TIMUR	360	399	424	Turun	Turun
1106	KABUPATEN ACEH TENGAH	192	309	186	Turun	Turun
1107	KABUPATEN ACEH BARAT	404	379	313	Naik	Naik
1108	KABUPATEN ACEH BESAR	245	87	78	Naik	Naik
1109	KABUPATEN PIDIE	260	358	361	Turun	Turun
1110	KABUPATEN BIREUEN	253	311	356	Turun	Turun
1111	KABUPATEN ACEH UTARA	389	385	393	Naik	Turun
1112	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	246	397	382	Turun	Turun
1113	KABUPATEN GAYO LUES	439	364	384	Naik	Naik
1114	KABUPATEN ACEH TAMIANG	219	224	216	Turun	Naik
1115	KABUPATEN NAGAN RAYA	396	404	355	Turun	Naik
1116	KABUPATEN ACEH JAYA	410	160	146	Naik	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-66-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1117	KABUPATEN BENER MERIAH	279	346	310	Turun	Turun
1118	KABUPATEN PIDIE JAYA	-	-		Kabupaten baru	Kabupaten baru
1171	KOTA BANDA ACEH	98	7	19	Naik	Naik
1172	KOTA SABANG	40	51	25	Turun	Naik
1173	KOTA LANGSA	194	79	73	Naik	Naik
1174	KOTA LHOKSEUMAWE	205	145	217	Naik	Turun
1175	KOTA SUBULUSSALAM	-	-		Kota baru	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Aceh seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 6 kabupaten/kota dari 21 kabupaten/kota ada perbedaan status peringkat antara model IPKM 2007 dan model pengembangan IPKM 2013 jika dibandingkan dengan peringkat IPKM 2007.

Dengan menggunakan 30 indikator sebagai dasar menghitung IPKM menghasilkan 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengalami kenaikan peringkat dibanding IPKM 2007.

**Tabel 4.15. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Sumatera Utara**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1201	KABUPATEN NIAS	425	420	428	Naik	Turun
1202	KABUPATEN MANDAILING NATAL	421	377	396	Naik	Naik
1203	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	356	313	309	Naik	Naik
1204	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	386	424	430	Turun	Turun
1205	KABUPATEN TAPANULI UTARA	349	249	204	Naik	Naik
1206	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	143	104	41	Naik	Naik
1207	KABUPATEN LABUHAN BATU	226	167	132	Naik	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-67-

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
1208	KABUPATEN ASAHAN	172	164	153	Naik	Naik
1209	KABUPATEN SIMALUNGUN	282	171	86	Naik	Naik
1210	KABUPATEN DAIRI	257	278	185	Turun	Naik
1211	KABUPATEN KARO	135	173	115	Turun	Naik
1212	KABUPATEN DELI SERDANG	106	184	224	Turun	Turun
1213	KABUPATEN LANGKAT	189	229	206	Turun	Turun
1214	KABUPATEN NIAS SELATAN	435	430	425	Naik	Naik
1215	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	327	200	116	Naik	Naik
1216	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	376	324	182	Naik	Naik
1217	KABUPATEN SAMOSIR	308	182	93	Naik	Naik
1218	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	130	206	113	Turun	Naik
1219	KABUPATEN BATU BARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1220	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1221	KABUPATEN PADANG LAWAS	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1222	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1223	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1224	KABUPATEN NIAS UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1225	KABUPATEN NIAS BARAT	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1271	KOTA SIBOLGA	285	103	45	Naik	Naik





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-68-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1272	KOTA TANJUNG BALAI	140	153	106	Turun	Naik
1273	KOTA PEMATANG SIANTAR	31	88	11	Turun	Naik
1274	KOTA TEBING TINGGI	95	106	63	Turun	Naik
1275	KOTA MEDAN	14	58	33	Turun	Turun
1276	KOTA BINJAI	86	56	79	Naik	Naik
1277	KOTA PADANG SIDEMPUAN	129	310	315	Turun	Turun
1278	KOTA GUNUNGSITOLI	-	-	-	Kota baru	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Sumatera Utara seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 19 kabupaten/kota dari 25 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat.

**Tabel 4.16. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Sumatera Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1301	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	409	427	401	Turun	Naik
1302	KABUPATEN PESISIR SELATAN	380	318	279	Naik	Naik
1303	KABUPATEN SOLOK	247	340	299	Turun	Turun
1304	KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG	298	296	327	Naik	Turun
1305	KABUPATEN TANAH DATAR	259	169	117	Naik	Naik
1306	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	301	303	249	Turun	Naik
1307	KABUPATEN AGAM	195	115	119	Naik	Naik
1308	KABUPATEN LIMA PULUH KOTO	328	268	271	Naik	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-69-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1309	KABUPATEN PASAMAN	367	367	278	Tetap	Naik
1310	KABUPATEN SOLOK SELATAN	407	158	114	Naik	Naik
1311	KABUPATEN DHARMASRAYA	270	203	203	Naik	Naik
1312	KABUPATEN PASAMAN BARAT	378	375	377	Naik	Naik
1371	KOTA PADANG	78	72	60	Naik	Naik
1372	KOTA SOLOK	50	132	18	Turun	Naik
1373	KOTA SAWAHLUNTO	87	24	31	Naik	Naik
1374	KOTA PADANG PANJANG	34	64	16	Turun	Naik
1375	KOTA BUKIT TINGGI	33	29	8	Naik	Naik
1376	KOTA PAYAKUMBUH	63	67	29	Turun	Naik
1377	KOTA PARIAMAN	144	215	118	Turun	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Sumatera Barat seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, Sebanyak 17 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat.

**Tabel 4.17. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Riau**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1401	KABUPATEN KUANTAN SENGGIGI	334	276	347	Naik	Turun
1402	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	305	231	250	Naik	Naik
1403	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	413	386	379	Naik	Naik
1404	KABUPATEN PELALAWAN	268	146	128	Naik	Naik
1405	KABUPATEN SIAK	137	127	80	Naik	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-70-

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
1406	KABUPATEN KAMPAR	220	46	100	Naik	Naik
1407	KABUPATEN ROKAN HULU	169	256	253	Turun	Turun
1408	KABUPATEN BENGKALIS	369	174	183	Naik	Naik
1409	KABUPATEN ROKAN HILIR	350	248	337	Naik	Naik
1410	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1471	KOTA PEKAN BARU	105	21	5	Naik	Naik
1473	KOTA DUMAI	150	38	59	Naik	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Riau seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Sebanyak 9 kabupaten/kota dari 11 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat. Kota Pekanbaru menjadi peringkat 5 terbaik.

**Tabel 4.18. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Jambi**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
1501	KABUPATEN KERINCI	362	297	240	Naik	Naik
1502	KABUPATEN MERANGIN	240	250	290	Turun	Turun
1503	KABUPATEN SAROLANGUN	414	13	123	Naik	Naik
1504	KABUPATEN BATANG HARI	230	129	215	Naik	Naik
1505	KABUPATEN MUARO JAMBI	206	149	191	Naik	Naik
1506	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	368	342	281	Naik	Naik
1507	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	256	316	312	Turun	Turun
1508	KABUPATEN TEBO	238	264	318	Turun	Turun
1509	KABUPATEN BUNGO	346	288	335	Naik	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-71-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1571	KOTA JAMBI	17	93	56	Turun	Turun
1572	KOTA SUNGAI PENUH	-	-	-	Kota baru	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Jambi seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 6 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat dan Kabupaten Sarolangun mengalami kenaikan yang bermakna.

**Tabel 4.19. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Sumatera Selatan**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1601	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	107	241	296	Turun	Turun
1602	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	276	186	237	Naik	Naik
1603	KABUPATEN MUARA ENIM	263	226	219	Naik	Naik
1604	KABUPATEN LAHAT	243	232	303	Naik	Turun
1605	KABUPATEN MUSI RAWAS	338	299	359	Naik	Turun
1606	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	384	246	258	Naik	Naik
1607	KABUPATEN BANYUASIN	212	293	352	Turun	Turun
1608	KABUPATEN OKU SELATAN	366	412	406	Turun	Turun
1609	KABUPATEN OKU TIMUR	123	170	195	Turun	Turun
1610	KABUPATEN OGAN ILIR	275	221	272	Naik	Naik
1611	KABUPATEN EMPAT LAWANG	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1671	KOTA PALEMBANG	71	57	37	Naik	Naik
1672	KOTA PRABUMULIH	74	139	179	Turun	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-72-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1673	KOTA PAGAR ALAM	138	99	226	Naik	Turun
1674	KOTA LUBUK LINGGAU	51	157	172	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Sumatera Selatan seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 5 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat.

**Tabel 4.20. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Bengkulu**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1701	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	310	300	354	Naik	Turun
1702	KABUPATEN REJANG LEBONG	228	162	176	Naik	Naik
1703	KABUPATEN BENGKULU UTARA	300	199	238	Naik	Naik
1704	KABUPATEN KAUR	315	363	346	Turun	Turun
1705	KABUPATEN SELUMA	274	270	306	Naik	Turun
1706	KABUPATEN MUKO MUKO	183	197	205	Turun	Turun
1707	KABUPATEN LEBONG	381	238	320	Naik	Naik
1708	KABUPATEN KEPAHANG	232	332	305	Turun	Turun
1709	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1771	KOTA BENGKULU	46	25	77	Naik	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Bengkulu seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 3 kabupaten/kota dari 9 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-73-

**Tabel 4.21. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Lampung**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1801	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	248	321	328	Turun	Turun
1802	KABUPATEN TANGGAMUS	236	267	292	Turun	Turun
1803	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	167	166	163	Naik	Naik
1804	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	200	210	214	Turun	Turun
1805	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	203	155	202	Naik	Naik
1806	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	312	165	212	Naik	Naik
1807	KABUPATEN WAY KANAN	249	234	235	Naik	Naik
1808	KABUPATEN TULANG BAWANG	250	261	304	Turun	Turun
1809	KABUPATEN PESAWARAN	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1810	KABUPATEN PRINGSEWU	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1811	KABUPATEN MESUJI	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1812	KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
1871	KOTA BANDAR LAMPUNG	165	35	21	Naik	Naik
1872	KOTA METRO	11	3	20	Naik	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Lampung seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 4 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-74-

**Tabel 4.22. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Bangka Belitung**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
1901	KABUPATEN BANGKA	182	59	162	Naik	Naik
1902	KABUPATEN BELITUNG	173	86	198	Naik	Turun
1903	KABUPATEN BANGKA BARAT	342	292	297	Naik	Naik
1904	KABUPATEN BANGKA TENGAH	185	143	173	Naik	Naik
1905	KABUPATEN BANGKA SELATAN	323	247	350	Naik	Turun
1906	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	216	98	207	Naik	Naik
1971	KOTA PANGKAL PINANG	132	75	140	Naik	Turun

Kesimpulan: Berdasarkan IPKM 30 indikator, di Provinsi Bangka Belitung seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor dan kenaikan peringkat. Kenaikan skor dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.23. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Kepulauan Riau**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
2101	KABUPATEN KARIMUN	93	30	82	Naik	Naik
2102	KABUPATEN BINTAN	149	27	129	Naik	Naik
2103	KABUPATEN NATUNA	306	290	143	Naik	Naik
2104	KABUPATEN LINGGA	267	195	231	Naik	Naik
2105	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
2171	KOTA BATAM	79	16	28	Naik	Naik
2172	KOTA TANJUNG PINANG	52	32	121	Naik	Turun





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-75-

Kesimpulan: di Provinsi Kepulauan Riau seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM 30 indikator, sebanyak 5 kabupaten/kota dari 6 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat.

**Tabel 4.24. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi DKI Jakarta**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
3101	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	60	12	126	Naik	Turun
3171	KOTA JAKARTA SELATAN	19	19	49	Tetap	Turun
3172	KOTA JAKARTA TIMUR	64	34	88	Naik	Turun
3173	KOTA JAKARTA PUSAT	102	135	74	Turun	Naik
3174	KOTA JAKARTA BARAT	66	17	24	Naik	Turun
3175	KOTA JAKARTA UTARA	119	107	66	Naik	Naik

Kesimpulan: di Provinsi DKI Jakarta seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, 4 kabupaten/kota dari 6 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat.

**Tabel 4.25. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Jawa Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
3201	KABUPATEN BOGOR	287	283	321	Naik	Turun
3202	KABUPATEN SUKABUMI	347	245	273	Naik	Naik
3203	KABUPATEN CIANJUR	416	392	397	Naik	Naik
3204	KABUPATEN BANDUNG	208	305	218	Turun	Turun
3205	KABUPATEN GARUT	374	354	282	Naik	Naik
3206	KABUPATEN TASIKMALAYA	364	360	392	Naik	Turun
3207	KABUPATEN CIAMIS	170	220	288	Turun	Turun
3208	KABUPATEN KUNINGAN	16	31	164	Turun	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-76-

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
3209	KABUPATEN CIREBON	155	71	87	Naik	Naik
3210	KABUPATEN MAJALENGKA	251	187	252	Naik	Turun
3211	KABUPATEN SUMEDANG	101	183	152	Turun	Turun
3212	KABUPATEN INDRAMAYU	214	161	133	Naik	Naik
3213	KABUPATEN SUBANG	159	284	180	Turun	Turun
3214	KABUPATEN PURWAKARTA	329	156	157	Naik	Naik
3215	KABUPATEN KARAWANG	196	140	64	Naik	Naik
3216	KABUPATEN BEKASI	190	82	57	Naik	Naik
3217	KABUPATEN BANDUNG BARAT	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
3271	KOTA BOGOR	72	188	194	Turun	Turun
3272	KOTA SUKABUMI	113	236	269	Turun	Turun
3273	KOTA BANDUNG	37	63	44	Turun	Turun
3274	KOTA CIREBON	65	23	15	Naik	Naik
3275	KOTA BEKASI	55	60	70	Turun	Turun
3276	KOTA DEPOK	114	33	43	Naik	Naik
3277	KOTA CIMAH	25	101	76	Turun	Turun
3278	KOTA TASIKMALAYA	177	181	267	Turun	Turun
3279	KOTA BANJAR	89	172	168	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Jawa Barat seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, hanya 10 kabupaten/kota dari 25 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-77-

**Tabel 4.26. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Jawa Tengah**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
3301	KABUPATEN CILACAP	80	128	174	Turun	Turun
3302	KABUPATEN BANYUMAS	83	84	141	Turun	Turun
3303	KABUPATEN PURBALINGGA	187	235	254	Turun	Turun
3304	KABUPATEN BANJARNEGARA	242	257	286	Turun	Turun
3305	KABUPATEN KEBUMEN	136	89	170	Naik	Turun
3306	KABUPATEN PURWOREJO	152	124	156	Naik	Turun
3307	KABUPATEN WONOSOBO	127	209	155	Turun	Turun
3308	KABUPATEN MAGELANG	75	190	228	Turun	Turun
3309	KABUPATEN BOYOLALI	85	118	151	Turun	Turun
3310	KABUPATEN KLATEN	118	48	124	Naik	Turun
3311	KABUPATEN SUKOHARJO	6	2	13	Naik	Turun
3312	KABUPATEN WONOGIRI	29	109	84	Turun	Turun
3313	KABUPATEN KARANGANYAR	69	47	36	Naik	Naik
3314	KABUPATEN SRAGEN	117	112	50	Naik	Naik
3315	KABUPATEN GROBOGAN	278	225	233	Naik	Naik
3316	KABUPATEN BLORA	188	258	184	Turun	Naik
3317	KABUPATEN REMBANG	168	62	53	Naik	Naik
3318	KABUPATEN PATI	94	117	94	Turun	Tetap
3319	KABUPATEN KUDUS	92	37	72	Naik	Naik
3320	KABUPATEN JEPARA	162	227	236	Turun	Turun
3321	KABUPATEN DEMAK	186	193	139	Turun	Naik
3322	KABUPATEN SEMARANG	58	68	46	Turun	Naik
3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	104	205	171	Turun	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-78-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
3324	KABUPATEN KENDAL	157	125	85	Naik	Naik
3325	KABUPATEN BATANG	175	179	209	Turun	Turun
3326	KABUPATEN PEKALONGAN	145	163	229	Turun	Turun
3327	KABUPATEN PEMALANG	241	255	256	Turun	Turun
3328	KABUPATEN TEGAL	126	291	329	Turun	Turun
3329	KABUPATEN BREBES	292	366	223	Turun	Naik
3371	KOTA MAGELANG	1	36	10	Turun	Turun
3372	KOTA SURAKARTA	42	50	23	Turun	Naik
3373	KOTA SALATIGA	3	5	7	Turun	Turun
3374	KOTA SEMARANG	99	41	30	Naik	Naik
3375	KOTA PEKALONGAN	45	105	67	Turun	Turun
3376	KOTA TEGAL	134	81	81	Naik	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Jawa Tengah seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Hal yang harus menjadi perhatian adalah dengan IPKM 30 indikator, 21 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/ kota mengalami penurunan peringkat dan 1 kabupaten tetap pada peringkatnya

**Tabel 4.27. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi D.I. Yogyakarta**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
3401	KABUPATEN KULON PROGO	47	94	136	Turun	Turun
3402	KABUPATEN BANTUL	5	66	110	Turun	Turun
3403	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	49	222	160	Turun	Turun
3404	KABUPATEN SLEMAN	7	15	103	Turun	Turun
3471	KOTA YOGYAKARTA	4	97	107	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi D.I Yogyakarta seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat walau seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Hal ini harus menjadi perhatian Provinsi D.I. Yogyakarta.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-79-

**Tabel 4.28. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Jawa Timur**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
3501	KABUPATEN PACITAN	103	178	227	Turun	Turun
3502	KABUPATEN PONOROGO	100	70	65	Naik	Naik
3503	KABUPATEN TRENGGALEK	128	142	199	Turun	Turun
3504	KABUPATEN TULUNGAGUNG	28	90	97	Turun	Turun
3505	KABUPATEN BLITAR	97	191	251	Turun	Turun
3506	KABUPATEN KEDIRI	56	133	134	Turun	Turun
3507	KABUPATEN MALANG	166	207	211	Turun	Turun
3508	KABUPATEN LUMAJANG	202	294	326	Turun	Turun
3509	KABUPATEN JEMBER	215	330	363	Turun	Turun
3510	KABUPATEN BANYUWANGI	164	213	263	Turun	Turun
3511	KABUPATEN BONDOWOSO	229	378	295	Turun	Turun
3512	KABUPATEN SITUBONDO	235	307	301	Turun	Turun
3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	309	325	285	Turun	Turun
3514	KABUPATEN PASURUAN	147	240	187	Turun	Turun
3515	KABUPATEN SIDOARJO	44	78	175	Turun	Turun
3516	KABUPATEN MOJOKERTO	62	114	89	Turun	Turun
3517	KABUPATEN JOMBANG	73	110	120	Turun	Turun
3518	KABUPATEN NGANJUK	53	44	35	Naik	Naik
3519	KABUPATEN MADIUN	41	111	91	Turun	Turun
3520	KABUPATEN MAGETAN	59	91	130	Turun	Turun
3521	KABUPATEN NGAWI	67	141	165	Turun	Turun
3522	KABUPATEN BOJONEGORO	120	242	158	Turun	Turun
3523	KABUPATEN TUBAN	160	217	138	Turun	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-80-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
3524	KABUPATEN LAMONGAN	131	147	105	Turun	Naik
3525	KABUPATEN GRESIK	70	102	169	Turun	Turun
3526	KABUPATEN BANGKALAN	302	333	380	Turun	Turun
3527	KABUPATEN SAMPANG	426	272	311	Naik	Naik
3528	KABUPATEN PAMEKASAN	371	400	417	Turun	Turun
3529	KABUPATEN SUMENEP	365	390	410	Turun	Turun
3571	KOTA KEDIRI	35	14	3	Naik	Naik
3572	KOTA BLITAR	30	22	52	Naik	Turun
3573	KOTA MALANG	22	39	32	Turun	Turun
3574	KOTA PROBOLINGGO	90	113	111	Turun	Turun
3575	KOTA PASURUAN	18	80	38	Turun	Turun
3576	KOTA MOJOKERTO	20	54	14	Turun	Naik
3577	KOTA MADIUN	10	8	6	Naik	Naik
3578	KOTA SURABAYA	21	74	149	Turun	Turun
3579	KOTA BATU	15	40	42	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Jawa Timur seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor dan 30 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir semua kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat, walaupun kota Kediri dan kota Madiun masuk dalam peringkat 10 terbaik.

**Tabel 4.29. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Banten**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
3601	KABUPATEN PANDEGLANG	420	331	378	Naik	Naik
3602	KABUPATEN LEBAK	373	233	178	Naik	Naik
3603	KABUPATEN TANGERANG	141	154	144	Turun	Turun
3604	KABUPATEN SERANG	345	277	264	Naik	Naik



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-81-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
3671	KOTA TANGERANG	54	42	54	Naik	Tetap
3672	KOTA CILEGON	179	52	61	Naik	Naik
3673	KOTA SERANG	-	-	-	Kota baru	Kota baru
3674	KOTA TANGERANG SELATAN	-	-	-	Kota baru	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Banten seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM 30 indikator, sebanyak 1 kabupaten dari 6 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat dan 1 kota tidak mengalami perubahan peringkat.

**Tabel 4.30. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Bali**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
5101	KABUPATEN JEMBRANA	61	108	58	Turun	Naik
5102	KABUPATEN TABANAN	13	10	4	Naik	Naik
5103	KABUPATEN BADUNG	12	9	9	Naik	Naik
5104	KABUPATEN GIANYAR	2	4	1	Turun	Naik
5105	KABUPATEN KLUNGKUNG	110	120	39	Turun	Naik
5106	KABUPATEN BANGLI	176	202	108	Turun	Naik
5107	KABUPATEN KARANG ASEM	204	216	99	Turun	Naik
5108	KABUPATEN BULELENG	218	136	40	Naik	Naik
5171	KOTA DENPASAR	9	1	2	Naik	Naik

Kesimpulan: Berdasarkan IPKM 30 indikator, di Provinsi Bali seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor dan kenaikan peringkat. Secara nasional, 4 kabupaten/kota di Bali termasuk dalam 10 peringkat terbaik.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-82-

**Tabel 4.31. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
5201	KABUPATEN LOMBOK BARAT	296	274	259	Naik	Naik
5202	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	286	372	364	Turun	Turun
5203	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	237	196	244	Naik	Turun
5204	KABUPATEN SUMBAWA	303	122	102	Naik	Naik
5205	KABUPATEN DOMPU	336	328	239	Naik	Naik
5206	KABUPATEN BIMA	284	319	316	Turun	Turun
5207	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	234	137	142	Naik	Naik
5208	KABUPATEN LOMBOK UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
5271	KOTA MATARAM	48	53	75	Turun	Turun
5272	KOTA BIMA	252	262	196	Turun	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, 4 kabupaten/kota dari 9 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat dan hanya Kabupaten Sumbawa yang mengalami kenaikan cukup bermakna.

**Tabel 4.32. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
5301	KABUPATEN SUMBA BARAT	406	435	433	Turun	Turun
5302	KABUPATEN SUMBA TIMUR	422	408	418	Naik	Naik
5303	KABUPATEN KUPANG	370	415	374	Turun	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-83-

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
5304	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	399	438	429	Turun	Turun
5305	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	313	269	280	Naik	Naik
5306	KABUPATEN BELU	304	314	266	Turun	Naik
5307	KABUPATEN ALOR	395	414	360	Turun	Naik
5308	KABUPATEN LEMBATA	264	409	394	Turun	Turun
5309	KABUPATEN FLORES TIMUR	197	285	192	Turun	Naik
5310	KABUPATEN SIKKA	227	295	245	Turun	Turun
5311	KABUPATEN ENDE	316	384	403	Turun	Turun
5312	KABUPATEN NGADA	231	388	322	Turun	Turun
5313	KABUPATEN MANGGARAI	437	413	332	Naik	Naik
5314	KABUPATEN ROTE NDAO	401	418	415	Turun	Turun
5315	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	427	423	391	Turun	Naik
5316	KABUPATEN SUMBA TENGAH	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
5317	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
5318	KABUPATEN NAGEKEO	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
5319	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
5320	KABUPATEN SABU RAIJUA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
5371	KOTA KUPANG	32	130	62	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruhnya mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 7 kabupaten/kota dari 16 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-84-

**Tabel 4.33. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
6101	KABUPATEN SAMBAS	191	373	343	Turun	Turun
6102	KABUPATEN BENGKAYANG	319	315	317	Naik	Naik
6103	KABUPATEN LANDAK	403	116	137	Naik	Naik
6104	KABUPATEN PONTIANAK	178	298	302	Turun	Turun
6105	KABUPATEN SANGGAU	223	259	255	Turun	Turun
6106	KABUPATEN KETAPANG	363	223	345	Naik	Naik
6107	KABUPATEN SINTANG	262	401	351	Turun	Turun
6108	KABUPATEN KAPUAS HULU	383	237	221	Naik	Naik
6109	KABUPATEN SEKADAU	390	419	426	Turun	Turun
6110	KABUPATEN MELAWI	359	348	366	Naik	Turun
6111	KABUPATEN KAYONG UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
6112	KABUPATEN KUBU RAYA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
6171	KOTA PONTIANAK	125	43	22	Naik	Naik
6172	KOTA SINGKAWANG	88	85	112	Naik	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Kalimantan Barat seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 5 kabupaten/kota dari 12 kabupaten/kota mengalami peningkatan peringkat. kabupaten/kota yang mengalami penurunan peringkat, mungkin dapat mengacu pada Kabupaten Landak yang mengalami kenaikan yang bermakna.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-85-

**Tabel 4.34. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
6201	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	148	126	122	Naik	Naik
6202	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	280	251	275	Naik	Naik
6203	KABUPATEN KAPUAS	382	396	399	Turun	Turun
6204	KABUPATEN BARITO SELATAN	335	394	407	Turun	Turun
6205	KABUPATEN BARITO UTARA	297	357	323	Turun	Turun
6206	KABUPATEN SUKAMARA	326	304	276	Naik	Naik
6207	KABUPATEN LAMANDAU	307	338	353	Turun	Turun
6208	KABUPATEN SERUYAN	325	218	362	Naik	Turun
6209	KABUPATEN KATINGAN	348	380	409	Turun	Turun
6210	KABUPATEN PULANG PISAU	324	320	338	Naik	Turun
6211	KABUPATEN GUNUNG MAS	400	422	420	Turun	Turun
6212	KABUPATEN BARITO TIMUR	154	337	386	Turun	Turun
6213	KABUPATEN MURUNG RAYA	423	355	331	Naik	Naik
6271	KOTA PALANGKA RAYA	76	20	17	Naik	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Kalimantan Tengah seluruhnya mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 5 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-86-

**Tabel 4.35. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Kalimantan Selatan**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
6301	KABUPATEN TANAH LAUT	213	208	349	Naik	Turun
6302	KABUPATEN KOTA BARU	217	368	383	Turun	Turun
6303	KABUPATEN BANJAR	388	421	437	Turun	Turun
6304	KABUPATEN BARITO KUALA	353	406	427	Turun	Turun
6305	KABUPATEN TAPIN	281	287	291	Turun	Turun
6306	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	273	356	324	Turun	Turun
6307	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	158	335	339	Turun	Turun
6308	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	277	275	371	Naik	Turun
6309	KABUPATEN TABALONG	163	244	268	Turun	Turun
6310	KABUPATEN TANAH BUMBU	266	345	368	Turun	Turun
6311	KABUPATEN BALANGAN	354	370	395	Turun	Turun
6371	KOTA BANJARMASIN	124	119	71	Naik	Naik
6372	KOTA BANJAR BARU	39	45	125	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Kalimantan Selatan seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian terhadap indikator-indikator yang ada pada model pengembangan IPKM 2013.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-87-

**Tabel 4.36. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Kalimantan Timur**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
6401	KABUPATEN PASIR	181	212	213	Turun	Turun
6402	KABUPATEN KUTAI BARAT	207	306	357	Turun	Turun
6403	KABUPATEN KUTAI	151	175	131	Turun	Naik
6404	KABUPATEN KUTAI TIMUR	244	150	161	Naik	Naik
6405	KABUPATEN BERAU	91	131	177	Turun	Turun
6406	KABUPATEN MALINAU	224	192	208	Naik	Naik
6407	KABUPATEN BULUNGAN	377	189	241	Naik	Naik
6408	KABUPATEN NUNUKAN	317	254	232	Naik	Naik
6409	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	116	95	34	Turun	Naik
6410	KABUPATEN TANA TIDUNG	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
6471	KOTA BALIKPAPAN	8	11	12	Turun	Turun
6472	KOTA SAMARINDA	108	49	47	Naik	Naik
6473	KOTA TARA KAN	68	138	127	Turun	Turun
6474	KOTA BONTANG	23	76	26	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Kalimantan Timur seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 7 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena lebih dari setengah kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-88-

**Tabel 4.37. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Sulawesi Utara**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
7101	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	201	387	414	Turun	Turun
7102	KABUPATEN MINAHASA	139	176	188	Turun	Turun
7103	KABUPATEN KEP. SANGIHE TALAUD	153	194	98	Turun	Naik
7104	KABUPATEN KEP. TALAUD	174	336	307	Turun	Turun
7105	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	82	123	150	Turun	Turun
7106	KABUPATEN MINAHASA UTARA	133	69	189	Naik	Turun
7107	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7108	KABUPATEN KEP. SITARO	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7109	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7110	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7111	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7171	KOTA MANADO	24	6	48	Naik	Turun
7172	KOTA BITUNG	57	77	148	Turun	Turun
7173	KOTA TOMOHON	38	26	69	Naik	Turun
7174	KOTA KOTAMOBAGU	-	-	-	Kota baru	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Utara seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 8 kabupaten/kota dari 9 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat.



**Tabel 4.38. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Sulawesi Tengah**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
7201	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	330	431	411	Turun	Turun
7202	KABUPATEN BANGGAI	265	211	300	Naik	Turun
7203	KABUPATEN MOROWALI	239	252	262	Turun	Turun
7204	KABUPATEN POSO	142	281	234	Turun	Turun
7205	KABUPATEN DONGGALA	337	402	385	Turun	Turun
7206	KABUPATEN TOLI TOLI	387	411	422	Turun	Turun
7207	KABUPATEN BUOL	392	230	230	Naik	Naik
7208	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	320	381	416	Turun	Turun
7209	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	295	428	435	Turun	Turun
7210	KABUPATEN SIGI	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7271	KOTA PALU	193	96	55	Naik	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Tengah seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Hal ini harus menjadi perhatian karena berdasarkan IPKM dengan 30 indikator sebanyak 8 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota mengalami penurunan.

**Tabel 4.39. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
7301	KABUPATEN SELAYAR	161	198	247	Turun	Turun
7302	KABUPATEN BULUKUMBA	311	353	375	Turun	Turun
7303	KABUPATEN BANTAENG	318	410	404	Turun	Turun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-90-

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
7304	KABUPATEN JENEPONTO	424	351	340	Naik	Naik
7305	KABUPATEN TAKALAR	269	152	145	Naik	Naik
7306	KABUPATEN GOWA	290	323	287	Turun	Naik
7307	KABUPATEN SINJAI	331	326	265	Naik	Naik
7308	KABUPATEN MAROS	258	239	257	Naik	Naik
7309	KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN	180	273	222	Turun	Turun
7310	KABUPATEN BARRU	210	185	181	Naik	Naik
7311	KABUPATEN BONE	355	395	381	Turun	Turun
7312	KABUPATEN SOPPENG	36	61	90	Turun	Turun
7313	KABUPATEN WAJO	288	282	248	Naik	Naik
7314	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	81	151	104	Turun	Turun
7315	KABUPATEN PINRANG	121	350	298	Turun	Turun
7316	KABUPATEN ENREKANG	111	168	109	Turun	Naik
7317	KABUPATEN LUWU	299	391	400	Turun	Turun
7318	KABUPATEN TANA TORAJA	379	393	390	Turun	Turun
7322	KABUPATEN LUWU UTARA	272	308	284	Turun	Turun
7325	KABUPATEN LUWU TIMUR	184	134	101	Naik	Naik
7326	KABUPATEN TORAJA UTARA	-	-	-	Kabupate n baru	Kabupaten baru
7371	KOTA MAKASSAR	27	73	83	Turun	Turun
7372	KOTA PARE PARE	112	28	27	Naik	Naik
7373	KOTA PALOPO	26	204	135	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Selatan seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 13 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena lebih dari setengah kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-91-

**Tabel 4.40. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Sulawesi Tenggara**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
7401	KABUPATEN BUTON	289	362	243	Turun	Naik
7402	KABUPATEN MUNA	357	344	388	Naik	Turun
7403	KABUPATEN KONAWE	271	266	270	Naik	Naik
7404	KABUPATEN KOLAKA	294	289	314	Naik	Turun
7405	KABUPATEN KONAWE SELATAN	314	243	365	Naik	Turun
7406	KABUPATEN BOMBANA	351	407	358	Turun	Turun
7407	KABUPATEN WAKATOBI	340	18	51	Naik	Naik
7408	KABUPATEN KOLAKA UTARA	397	100	96	Naik	Naik
7409	KABUPATEN BUTON UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7410	KABUPATEN KONAWE UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7471	KOTA KENDARI	96	83	68	Naik	Naik
7472	KOTA BAUBAU	209	359	330	Turun	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Tenggara seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 5 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat. Kabupaten/kota yang mengalami penurunan peringkat, mungkin dapat mengacu pada Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara yang mengalami kenaikan skor dan peringkat yang cukup bermakna.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-92-

**Tabel 4.41. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Gorontalo**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
7501	KABUPATEN BOALEMO	411	312	308	Naik	Naik
7502	KABUPATEN GORONTALO	372	148	260	Naik	Naik
7503	KABUPATEN POHUWATO	419	317	367	Naik	Naik
7504	KABUPATEN BONE BOLANGO	333	280	197	Naik	Naik
7505	KABUPATEN GORONTALO UTARA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
7571	KOTA GORONTALO	146	144	147	Naik	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Gorontalo seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan model 30 indikator, 1 kabupaten/kota yang mengalami penurunan tetapi tidak bermakna.

**Tabel 4.42. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Sulawesi Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
7601	KABUPATEN MAJENE	221	177	225	Naik	Turun
7602	KABUPATEN POLEWALI MAMASA	322	334	333	Turun	Turun
7603	KABUPATEN MAMASA	430	349	242	Naik	Naik
7604	KABUPATEN MAMUJU	412	286	261	Naik	Naik
7605	KABUPATEN MAMUJU UTARA	405	361	402	Naik	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Sulawesi Barat seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 2 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-93-

**Tabel 4.43. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Maluku**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
8101	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	385	382	319	Naik	Naik
8102	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	233	279	274	Turun	Turun
8103	KABUPATEN MALUKU TENGAH	199	322	293	Turun	Turun
8104	KABUPATEN BURU	415	341	369	Naik	Naik
8105	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	394	426	419	Turun	Turun
8106	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	352	383	348	Turun	Naik
8107	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	433	434	434	Turun	Turun
8108	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
8109	KABUPATEN BURU SELATAN	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
8171	KOTA AMBON	43	92	92	Turun	Turun
8172	KOTA TUAL	-	-	-	Kota baru	Kota baru

Kesimpulan: di Provinsi Maluku seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, hanya 3 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena lebih dari setengah kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-94-

**Tabel 4.44. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Maluku Utara**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
8201	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	283	265	220	Naik	Naik
8202	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	361	398	373	Turun	Turun
8203	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	291	433	431	Turun	Turun
8204	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	375	389	389	Turun	Turun
8205	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	341	159	159	Naik	Naik
8206	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	339	369	341	Turun	Turun
8207	KABUPATEN PULAU MOROTAI	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
8271	KOTA TERNATE	109	55	154	Naik	Turun
8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN	84	65	166	Naik	Turun

Kesimpulan: di Provinsi Maluku Utara seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 6 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena hampir semua kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat, jika mengacu 30 indikator.

**Tabel 4.45. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Papua Barat**

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
9101	KABUPATEN FAKFAK	211	343	344	Turun	Turun
9102	KABUPATEN KAIMANA	402	201	277	Naik	Naik





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-95-

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
9103	KABUPATEN TELUK WONDAMA	408	339	190	Naik	Naik
9104	KABUPATEN TELUK BINTUNI	293	352	283	Turun	Naik
9105	KABUPATEN MANOKWARI	255	263	289	Turun	Turun
9106	KABUPATEN SORONG SELATAN	358	429	413	Turun	Turun
9107	KABUPATEN SORONG	222	376	342	Turun	Turun
9108	KABUPATEN RAJA AMPAT	261	417	412	Turun	Turun
9109	KABUPATEN TAMBRAUW	-	-	-	-	-
9110	KABUPATEN MAYBRAT	-	-	-	-	-
9171	KOTA SORONG	156	121	210	Naik	Naik

Kesimpulan: di Provinsi Papua Barat seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan skor. Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 5 kabupaten/kota dari 9 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat. Hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bahwa hampir semua kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat dan hanya Kabupaten Teluk Wondama yang mengalami kenaikan bermakna.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-96-

**Tabel 4.46. Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013  
di Provinsi Papua**

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
9401	KABUPATEN MERAUKE	122	228	200	Turun	Turun
9402	KABUPATEN JAYAWIJAYA	428	432	436	Turun	Turun
9403	KABUPATEN JAYAPURA	171	253	193	Turun	Turun
9404	KABUPATEN NABIRE	343	327	336	Naik	Naik
9408	KABUPATEN YAPEN WAROPEN	332	329	294	Naik	Naik
9409	KABUPATEN BIAK NUMFOR	225	214	167	Naik	Naik
9410	KABUPATEN PANIAI	436	439	432	Turun	Naik
9411	KABUPATEN PUNCAK JAYA	438	425	421	Naik	Naik
9412	KABUPATEN MIMIKA	254	301	334	Turun	Turun
9413	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	417	436	438	Turun	Turun
9414	KABUPATEN MAPPI	431	403	423	Naik	Naik
9415	KABUPATEN ASMAT	432	405	398	Naik	Naik
9416	KABUPATEN YAHUKIMO	434	437	439	Turun	Turun
9417	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	440	371	376	Naik	Naik
9418	KABUPATEN TOLIKARA	429	440	440	Turun	Turun
9419	KABUPATEN SARMI	198	260	325	Turun	Turun
9420	KABUPATEN KEEROM	115	365	387	Turun	Turun
9426	KABUPATEN WAROPEN	418	347	405	Naik	Naik
9427	KABUPATEN SUPIORI	398	374	370	Naik	Naik
9428	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-97-

<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Peringkat IPKM 2007</b>	<b>Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Peringkat Pengemangan IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat IPKM 2013</b>	<b>Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013</b>
9429	KABUPATEN NDUGA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
9430	KABUPATEN LANNY JAYA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
9431	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
9432	KABUPATEN YALIMO	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
9433	KABUPATEN PUNCAK	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
9434	KABUPATEN DOGIYAI	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
9435	KABUPATEN INTAN JAYA	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
9436	KABUPATEN DEIYAI	-	-	-	Kabupaten baru	Kabupaten baru
9471	KOTA JAYAPURA	77	271	95	Turun	Turun

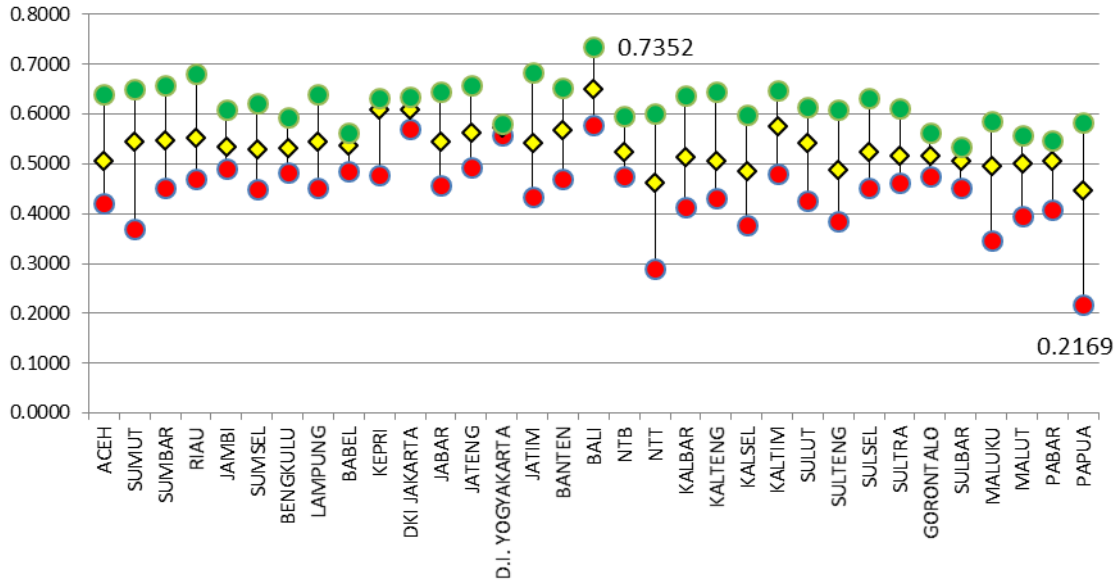
Kesimpulan: Berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, di Provinsi Papua ditemukan 1 kabupaten mengalami penurunan skor dan penurunan peringkat, sedangkan kabupaten/kota lain mengalami kenaikan skor. Sebanyak 10 kabupaten/kota dari 20 kabupaten/kota mengalami kenaikan peringkat. Hal ini harus menjadi perhatian karena setengah kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat, bahkan 1 kabupaten mengalami penurunan skor.

Berdasarkan nilai IPKM 2013 hasil pengembangan model dengan 30 indikator dapat dilihat juga kesenjangan antar wilayah. Permasalahan kesenjangan tersebut dapat diselesaikan dengan melihat perbandingan indeks kelompok indikator antara IPKM dengan skor yang baik dan skor buruk. Contoh tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2. Perihal kesenjangan per provinsi berdasarkan model pengembangan IPKM dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 4.3.



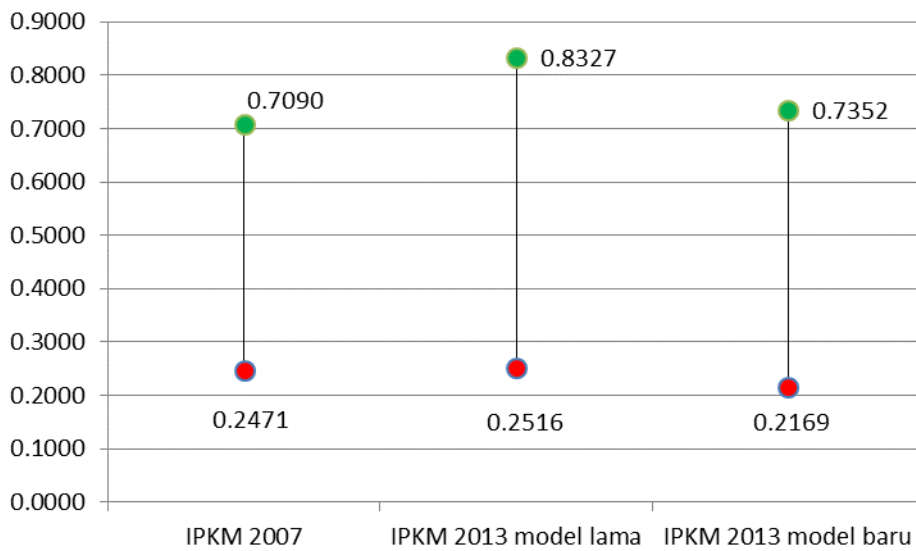
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-98-



**Gambar 4.3.** Kesenjangan Wilayah menurut Pengembangan Model IPKM 2013

Pada Gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa kesenjangan terlebar di Provinsi Papua dan hampir tidak ada kesenjangan di Provinsi D.I Yogyakarta. Perbandingan kesenjangan antar wilayah se-Indonesia ditunjukkan dengan nilai IPKM tahun 2007 untuk 440 kabupaten/kota berkisar 0,2471-0,7090 dan nilai model pengembangan IPKM 2013 untuk 497 kabupaten/kota berkisar 0,2169-0,7352. Hal ini dapat lihat pada Gambar 4.4.



**Gambar 4.4.** Kesenjangan Wilayah IPKM 2007-2013



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-99-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat bagi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan yang lebih spesifik sesuai dengan besaran masalah di kabupaten/kota.

Meskipun demikian terdapat beberapa keterbatasan dalam perumusan IPKM 2013 yang mencakup keterbatasan pada data Riskesdas 2013 terkait rentang nilai yang terlalu lebar pada variabel tertentu, sehingga tidak bisa diikutsertakan dalam indikator IPKM. Di samping itu, masih terdapat keterbatasan terkait penetapan angka minimal dan maksimal yang masih belum didukung oleh acuan yang dapat menjadi dasar penggunaan, sehingga disepakati untuk menggunakan kombinasi angka empiris data Riskesdas 2013 dan nilai ideal.

Pada akhirnya, semua pihak yang terkait dengan program kesehatan baik di tingkat pusat dan daerah, diharapkan dapat memahami makna dan tujuan dari IPKM. Berkomitmen nyata untuk menindaklanjutinya sebagai upaya memperkecil kesenjangan dan ketidakadilan pembangunan kesehatan antar kabupaten/kota dan kesenjangan karena perbedaan status kabupaten dan kota di Indonesia. Upaya menindaklanjuti IPKM menjadi sangat penting agar dapat mencapai pembangunan kesehatan yang lebih optimal. Tanpa diikuti oleh upaya tindak lanjut yang efektif maka akan mengurangi makna utama yang sebenarnya dari IPKM.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NILA FARID MOELOEK